PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Sosial (S.Sos)
Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam

Oleh
Helwa Septi Tricahyani
NIM : 12510029

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2016

NOTA PEMBIMBING

Hal :Pengajuan Ujian Munaqosah

Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang
Di-
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Helwa Septi Tricahyani, NIM 12 5100 29 yang berjudul **"Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Melalui Revolusi Mental Berbasis Keluarga"** sudah dapat diajukan dalam ujian Munaqosah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian, Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2 Desember 2016

Pembimbing I

Drs. Syahir Badruddin, M.Si
NIP. 195212231983031003

Pembimbing II

Henny Yusalia, M.Hum
NIP. 198201162009012009

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Helwa Septi Tricahyani

NIM : 12510029

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi : **Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga**

Telah dimunaqosyakan dalam sidang terbuka Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Hari/Tanggal : Rabu / 25 Januari 2017

Tempat : Ruang Sidang Munaqosyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Konsentrasi Hubungan Masyarakat.

Palembang, 25 Januari 2017

DEKAN

KEMENTERIAN AGAMA R.I. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI PALEMBANG

Dr. Kusnadi, M.A.
NIP. 197108192000031002

TIM PENGUJI

KETUA

Manalullailli, M.Ed
NIP. 197204152003122003

SEKRETARIS

Anita Trisiah, M.Sc
NIP. 198209242011012010

PENGUJI I

Drs. H. M. Musrin HM, M.Hum
NIP. 195312261986031001

PENGUJI II

Rosita Baiti, M.Pd.I
NIP. 197302262000032002

MOTTO

"Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan"

KU DEDIKASIKAN TULISAN INI:

- ***Untuk kedua orang tua tercinta, Bapak Purnomo dan Ibu Purwanti Asri Ningtyas, serta kedua saudara ku tersayang Hermah Wawanto dan Qoyyum Inkan Drinatiar, yang selalu memberikan doa, dukungan, pengorbanan tanpa henti, dan dalam bentuk apapun, baik secara moral maupun materi.***
- ***Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku Miranda Uju Lestari, Nurcahyani Putri Lestari yang selalu menemani selama 4 tahun ini dan teman-teman Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2012 yang selalu bersamaku dan memberikan dukungan serta tangis dan tawa yang pernah kita rasakan bersama.***

SURAT PERNYATAAN

Yang betanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Helwa Septi Tricahyani**
Tempat Tanggal Lahir	: Madiun, 10 September 1994
Fakultas	: Dakwah dan Komunikasi
Jurusan	: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Judul	: **Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali yang disebut sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengelolahan, serta pemikirian saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang Maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

   Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam peryataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 19 Oktober 2016

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

HELWA SEPTI TRICAHYANI

NIM: 12510029

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang menjadikan manusia sebaik-baik ciptaan di muka bumi ini. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman.

Syukur *Alhamdulillah*, berkat karunia dan bimbingan-Nya, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul : "**Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga**". Begitu juga dengan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, diucapkan terima kasih atas segala bantuan, baik moral maupun materil. Serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Yth Bapak Prof. Drs. H. Sirozi, MA. Ph. D, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Yth. Dr. Kusnadi, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Drs. Syahir Badruddin, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Henny Yusalia, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Administrasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.
6. Kedua Orang tuaku dan saudara-saudaraku yang selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, fasilitas, perhatian, pengertian serta semangat dan motivasi yang tak terhingga.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan KPI B angkatan 2012 terima kasih untuk segala kenangan dan pengalaman yang dijalani bersama, mulai dari manis dan pahit, dari awal kuliah sampai penyusunan skripsi. Sangat bangga menjadi bagian dari Keluarga KPI B 2012.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun dengan mengharap ridho Allah SWT semoga apa yang mereka sumbangkan kepada peneliti menjadi amal sholeh dan semoga ini dapat bermanfaat bagi Nusa, Bangsa, Negara dan Agama.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 2 Desember 2016

Peneliti,

HELWA SEPTI TRICAHYANI

NIM: 12510029

DAFTAR ISI

Hal.

HALAMAN JUDUL i
NOTA PEMBIMBING ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
MOTTO DAN DEDIKASI iv
SURAT PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR GAMBAR xi
ABSTRAK xiii
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Kerangka Teori 9
G. Metodologi Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 16
BAB II. LANDASAN TEORI
A. Konsep Peran 18
B. Konsep Humas 20
C. Peran Humas 22
D. Humas Pemerintah 30
E. Pengertian Sosialisasi 36

BAB III. GAMBARAN UMUM BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan 39

B. Lokasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan 42

C. Dasar Hukum Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan 43

D. Visi dan Misi dan Tujuan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 45

E. Strategi dan Nilai Dasar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional 47

F. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.....48

G. Tugas, Fungsi dan Kewenangan 49

H. Daftar Jumlah Pegawai BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.....51

I. Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.....54

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 57

B. Hambatanan Tantangan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Melalui Berbasis Keluarga 87

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA.....95

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal.
Gambar 3.1	Gedung BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	41
Gambar 3.2	Lokasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	42
Gambar 3.3	Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	48
Gambar 3.4	Depan Ruang Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	54
Gambar 4.1	Plang Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling	60
Gambar 4.2	Arus Komunikasi	62
Gambar 4.3	Peringatan Hari Keluarga Tingkat Sumatera Selatan di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	63
Gambar 4.4	Rapat Pembukaan Review Program KKBPK Provinsi Sumatera Selatan	67
Gambar 4.5	Duta Mahasiswa Genre saat Mengikuti Sosialisasi Program KKBPK	70
Gambar 4.6	Halaman Depan Website BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	72
Gambar 4.7	Halaman Depan Akun Twitter BKKBN Provinsi Sumsel	74
Gambar 4.8	BKKBN Menggandeng TVRI dalam Mensosialisasikan Program	76
Gambar 4.9	Sumatera Selatan Sosialisasi KKBPK Secara Langsung	78
Gambar 4.10	Berita Negatif yang Berkaitan tentang BKKBN	82
Gambar 4.11	Ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Genre	84
Gambar 4.12	Mobil Operasional BKKBN Provinsi Sumatera Selatan	88

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran humas yang digunakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga berbasis keluarga. Program KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menggunakan humas yang menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam mensosialisaikan programnya. Melihat pentingnya program Keluarga Berencana untuk menghadapi bonus demografi mendatang, maka dari itu skripsi yang penulis buat berjudul **"Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga".** Terdapat rumusan dari masalah ini yakni yang pertama Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisaikan program KKBPK berbasis keluarga, serta faktor yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mensosialisasikan program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Informan primer dalam penelitian ini ialah bidang humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan informan sekundernya ialah masyarakat Kota Palembang yang bermukim di daerah Sekojo Kec. Kalidoni. Pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk menganalisis data mengunakan metode analisis studi deskriptif yakni, mendeskripsikan data yang didapat melalui realita dan fenomena yang sebenarnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas yang digunakan BKKBN Provinsi Sumatera hambatan dan tantangannya.

Seiring dengan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian skripsi ini, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa peran humas dalam mensosialisasikan program KKBPK berbasis keluarga yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan indikator-indikator dari teori yang digunakan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi adapun faktor penghambat dan tantangan dalam mensosialisasikan program tersebut ialah kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih kurang dan masalah dana.

Kata Kunci: Humas, BKKBN, KKBPK

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di setiap Negara tentu memiliki berbagai macam lembaga pemerintahan di dalamnya untuk membantu program-program pemerintah yang dicanangkan. Di Negara Indonesia ada sebuah lembaga pemerintahan yang programnya fokus dalam bidang kependudukan dan keluarga. BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

Selain itu dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, arah kebijakan BKKBN salah satunya adalah mempromosikan kepada masyarakat umum tentang Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Program KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas.[1]

Program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dicanangkan pemerintah secara nasional sejak tahun 1970, dalam perkembagannya terus mengalami pasang surut. Sayangnya, perhatian dan dukungan berbagai pihak

[1] http://news.liputan6.com/read/2174726/harapan-baru-bangkitnya-program-pembangunan-keluarga di akses pada 12 Feb 2015 pukul 10:35 WIB

terhadap program KKB jauh menurun sejak era reformasi. Walaupun belakangan terlihat mulai menggeliat. Ternyata lengahnya perhatian selama kurang lebih satu dasawarsa harus dibayar mahal. Bukan hanya gaung KKB yang nyaris tak terdengar setelah sebelumnya gegap gempita, tetapi juga peningkatan LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) yang cukup mengejutkan setelah beberapa dasawarsa terus mengalami penurunan cukup signifikan. Bila LPP pada periode 1971 - 1980 besarnya masih 2,31% pertahun dan pada periode 1980 - 1990 dapat diturunkan menjadi 1,98% dan dapat ditekan lagi menjadi 1,45% pada periode 1990 - 2000, maka pada periode 2000 - 2010 kembali naik menjadi 1,49%. Yang menyedihkan, kita yang banyak berharap terhadap kenaikan peserta KB aktif untuk menekan TFR (*Total Fertility Rate*) yaitu jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita, juga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Terbukti, selama satu dasa warsa terakhir TFR tetap dalam kondisi stagnan. Ini dapat dilihat dari hasil SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) 2002 - 2003, 2007 dan 2012.[2]

Meskipun program KKB telah diatur oleh UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan ada juga PP No 57 Tahun 2009 yang mengikutinya telah disahkan pemerintah, perhatian pemerintah kabupaten/kota terhadap program KKB belum sesuai harapan. Hal ini dikarenakan komitmen sebagian besar kepala daerah yang kurang mendukung

[2]Mardiya, http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Tantangan-Program-KKB-Makin-Berat_3184, di akses pada 23 Juni 2016 pukul 08.25 WIB

pelaksanaan program KKB karena dianggap tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap peningkatan APBD. Hal ini dapat dipahami karena program KKB adalah program sosial dasar yang baru dapat dirasakan manfaatnya 10 atau 20 tahun mendatang, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang mengharuskan mereka menyusun skala prioritas dan untuk sementara mengesampingkan program KKB, keterbatasan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, dan keterbatasan sarana prasarana pendukung kelancaran program, walaupun keterbatasan ini belakangan dapat diminimalisir dengan adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang KB untuk penyediaan sarana prasarana program KKB sejak tahun 2008 lalu.[3]

Pada tahun 2020-2030 mendatang Indonesia akan dihadapkan pada bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari penduduk usia non-produktif, yaitu anak dan kelompok usia lanjut. Angkatan kerja pada rentang waktu tersebut mencapai 70 persen, sedangkan sisanya berusia 15 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas hanya 30 persen.[4]

Dari data tersebut maka dibutuhkan pengelola bonus demografi untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Untuk menghadapi bonus demografi diperlukan pembangunan karakter bangsa. Oleh karena itu perlu dilakukan pembenahan secara serius terutama dimulai dari keluarga untuk menghadapi tantangan kedepan.

---

[3]*Ibid;*

[4]http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=732 di akses pada 16 September 2015 pukul 22:08 WIB

Selain itu BKKBN memiliki hubungan yang erat dengan humas yang dalam aktivitas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik (*two way communications*) antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi tercapainya suatu tujuan tertentu. Kegiatan humas tersebut sangat erat hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari masyarakat.[5] Humas berkewajiban untuk memberikan informasi yang aktual, terutama informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar publik mampu menangkap informasi yang diberikan.[6]

Dari hal ini terlihat bahwa humas memiliki peranan penting untuk melaksanakan program, mengelola, dan mengembangkannya agar berjalan dengan optimal sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah Sumatera Selatan bekerja ekstra dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga ini, termasuk dalam mempromosikan kepada mayarakat umum.

Penelitian dilakukan di bidang Humas dan Protokoler BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih penulis karena merupakan lembaga yang bergerak di bidang Keluarga Berencana. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut secara *purposive*, yaitu menentukan sampel dengan mempertimbangkan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal Selain itu

---

[5]Rosady Ruslan, S.H., *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 1

[6] *Ibid;*

alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini adalah peneliti tertarik untuk meneliti mengenai peran humas sesuai dengan objek kajian yang peneliti ambil. Berhubungan dengan hal ini peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "**PERAN HUMAS BKKBN DALAM MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA PEMBANGUNAN KELUARGA BERBASIS KELUARGA**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisaikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan humas BKKBN dalam mensosialisaikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga.

2. Untuk mengetahui hambatan dan tantangan humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam mengembangkan wawasan pemikiran serta pengetahuan dalam bidang peran humas di BKKBN, khususnya dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga agar menjadi acuan dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

   a. Dapat menambah pengalaman penulis dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dari perkuliahan bagi penulis.

   b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi organisasi untuk berbenah diri dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini akan dicantumkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai "Peran Humas" secara umum sebagai berikut:

Ariz Mazidah (2010) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Public Relations dalam Implementasi Community Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta.*"[7] Penelitian ini memfokuskan pada kegiatan pemberitaan dalam meningkatkan peran humas PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan program *community development,* peran *public relations* PT. Telkom Kandatel Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk menghandle acara, membuat random acara dan mengkomunikasikan setiap kegiatan yang diadakan oleh *Community Development Center* (CDC) kepada public serta menggunakan media relations sebagai sarana untuk menjangkau publik. Peran *public relations* dalam implementasi *Community Development* melakukan bauran *public relations* berupa: *publications* (publikasi dan publisitas), *event* (penyusunan program acara), *news* (menciptakan berita), *community involvemen* (kepedulian pada

[7]Aris Mazidah, "Peran Public Relations dalam Implementasi Commuity Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta", *Skripsi,* (Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010) dari http://digilib.uin-suka.ac.id/5286/1/BAB%20I,%20IV.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diakses pada 04 Januari 2016 pukul 06:01 WIB

komunitas), *inform or image* (memberitahukan atau meraih citra), *lobbying and negotiation* (Pendekatan dan bernegosiasi), *social responsibility* (tanggung jawab social).

Skripsi lainnya dengan judul Pengaruh *"Peran Hubungan Masyarakat (Humas) di Pemerintah Kabupaten Bantul"*, oleh Yuli Cahyaningrum (2013) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta.[8]

Penelitian ini menunjukan bahwa dari empat peran yang ada yaitu Teknik Komunikasi, *Expert Prescriber*, Fasilitator Komunikasi dan Fasilitator Pemecah Masalah, peran yang dilakukan oleh humas lebih cenderung menyampaikan informasi kepada masyarakat atau sebagai teknisi komunikasi dan mengelola fasilitas komunikasi yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, walaupun belum sempurna tetapi humas pada tiga instansi tersebut sudah berusaha melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Skripsi lainnya oleh Tika Oktavianingsih (2012) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dengan judul penelitian *"Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dalam Menjaga Reputasi Kinerja DPR RI)."*

---

[8]Yuli Cahyaningrum, Peran Humas (Hubungan Masyarakat) di Pemerintah Kabupaten Bantul, *Skripsi*, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammmadiyah, Yogyakarta, 2013), dari http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25611.pdf, diakses pada 19 Januari 2016 pukul 13:58 WIB

Hasil dari penelitian ini yaitu reputasi kinerja anggota dewan, Humas DPR RI telah melakukan berbagai strategi komunikasi untuk mempublikasikan kinerja anggota dewan dan menjaga hubungan baik dengan media. Humas mengalami hambatan-hambatan tertentu, yaitu kurangnya hubungan baik dengan *media relations* yang masih rendah.[9]

F. Kerangka Teori

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini diperlukan suatu teori, karena teori memiliki peranan sangat penting guna menunjang keberhasilan suatu penelitian. Dalam penelitian ini akan diangkat beberapa teori sebagai acuan dan landasan berpikir penelitian. Menurut Rosady Ruslan menjelaskan secara terperinci empat peran utama humas adalah sebagai berikut:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik.
2. Membina *relationship,* yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik.
3. Peranan sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan.

---

[9]Tika Otavianingsih, Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dlam menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI), *Skripsi*, (Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2012), dari http://li.ui.ac.id/file?file=digital/20300085-S-Tika%Oktavianingsih.pdf, diakses pada 6 Januari 2012 pukul 14:27 WIB

4. Membentuk *corporate image*, artinya peranan humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.[10]

Sedangkan Onong Uchjana mengungkapkan peranan *public relations*, yaitu mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya sekedar berbentuk *relations* dalam arti sempit, karena *personal relations* mempunyai peranan yang cukup besar dalam melakukan kampanye *public relations*. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian, dan pemahanan tentang aktivitas perusahaan atau lembaga termasuk membentuk sikap baik (*favorable*), itikad baik (*good willI*), toleransi (*tolerance)*, saling pengertian (*mutual understanding*), saling mempercayai (*mutual confidence*), saling menghargai (*mutual appreciation*), yang pada akhirnya akan menciptakan citra yang baik (*good image*).[11]

Selanjutnya menurut Frank Jefkins, pemahaman peran dan fungsi *public relations* secara operasional dan professional, adalah: *ability to get on with people, and good personal integrity*.[12] Kategori-kategori yang merupakan peran *public relations* untuk mendinamisasi perusahaan dan peran tersebut diharapkaan juga dapat menjadi mata dan telinga serta "*tangan kanan*" top manajemen dalam organisasi atau lembaga.

---

[10]Dr. H. Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setya, 2015), hlm. 56.

[11]Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

[12]Soleh Soemirt & Elvinaro Ardianto, *Dasar-Dasar Public Relations*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 13.

Dari teori-teori yang sudah dijelaskan diatas, teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori peran humas menuurt Rosady Ruslan. Teori peran humas Rosady Ruslan menjelaskan bahwa seorang humas harus memiliki ketrampilan hubungan antar individu dan ketrampilan teknis dalam berkomunikasi dan bersikap sehingga program yang disosialisasikan dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif mengamati peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat *positivism*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi alat dalam proses pengumpulan data adalah peneliti itu sendiri.[13]

[13]Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 9.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian yang dilakukan oleh penulis terbagi menjadi dua yaitu:

a. Informan primer yaitu humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan dua anggota BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

b. Informan sekunder yaitu masyarakat kota Palembang, khususnya yang bermukim di daerah Sekojo Kec. Kalidoni.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.[14] Dalam penelitian ini yang termasuk sebagai data primer adalah wawancara kepada sumber data atau para informan utama yaitu humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Data sekunder ini untuk melengkapi data primer, dan biasanya data sekunder ini sangat membantu peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang di keluarkan di berbagai organisasi atau

[14]Rosady Ruslan, S.H., M.M., *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Ed. 1. Cet. 3 PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 29.

perusahaan.[15] Data sekunder dalam penelitian ini dikeluarkan oleh humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, seperti jurnal, buku, maupun dokumen serta informasi melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth* interview), dan dokumentasi.[16] Proses pengumpulan data di lokasi penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Lantas peneliti menetapkan dan mendesain cara merekam wawancara tersebut. Wawancara yang sudah direkam harus dijaga dan ditempatkan di tempat yang baik, sehingga kualitas suara partisipan tetap terjamin, karena nantinya akan diputar dan di

[15] *Ibid;* hlm. 30.
[16] *Ibid;* hlm. 224-225.

dengar berkali-kali untuk dianalisis.[17] Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga berbasis keluarga.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan langsung kepada seorang informan atau seorang autoritas (seorang ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah). Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya disiapkan terlebih dahulu yang diarahkan kepada informasi-informasi untuk topik yang akan digarap.[18] Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan dua jenis pertanyaan. Pertama, wawancara terstruktur yaitu menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh penulis sebagai panduan (*interview guide*). Dan kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu mengggunakan pertanyaan-pertanyaan yang muncul secara spontan dan merupakan perkembangan dari daftar pertanyaan yang ada, sifatnya informal. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Kasubbid Advokasi & KIE dan staff Data dan Informasi. Hal-hal yang menjadi pertanyaan dalam wawancara yaitu bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program KKBPK berbasis keluarga dan apa faktor pendukung

---

[17]Prof. Dr. Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo), hlm. 112.

[18]Gorys Keraf, *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*, (Jakarta: Nusa Indah, 1989), hlm. 161.

dan penghambat peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan program KKBPK berbasis keluarga.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.[19] Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[20] Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah wawasan peneliti.

---

[19]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 158.

[20]Sugiyono, *Op.Cit;* hlm. 335.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori. Bab ini berisi konsep dan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan topik yang dibahas atau diteliti serta kerangka pemikiran tentang "Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga"

Bab III Gambaran Umum BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Bab ini berisikan sejarah BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, khususnya deskripsi objek penelitian bagian Humas BKKBN, visi misi, struktur organisasi dan lain-lain dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang Peran Humas BKKBN dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan untuk perbaikan selanjutnya.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Konsep Peran

Morisan, M.A. dalam bukunya *Manajemen Public Relations* menyatakan bahwa peran dan fungsi hubungan masyarakat dapat diwujudkan dalam program kegiatan humas yang telah dirancang sebelumnya dengan strategi yang tepat agar dapat berjalan dengan baik.[1]

Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan pendapat Soekamto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.[2]

Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, pejabat dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota macam ini akan member sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar member kesempatan

---

[1]Morisan, M.A. *Manajemen Public Relations*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 125.

[2]Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si., *Manajemen Publik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 43.

kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Dengan cara bersikap pasif, seseorang telah member sumbangan kepada terjadinya kemajuan dalam kelompok atau member sumbangan kepada kelompok agar tidak terjadi pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran yag kontradiktif.[3]

Peran juga mencakup tiga hal: (a) peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dengan demikian peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat; (b) peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peran juga menyangkut perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[4]

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian peran terkandung makna, penyesuaian atau dinamisasi dari fungsi-fungsi yang melekat pada seseorang atau badan lembaga, yang di dalamnya terdapat wewenang, hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peran mengandung hak dan kewajiban yang harus dijalankan seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam kesehariannya.

---

[3]Prof. Dr. HM. Burhan Bungin, S.Sos., M.Si, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 274

[4]Prof. Dr. Soerjono Soekanto dan Dra Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 244

Soerjono Soekamto mrnyatakan bahwa terdapat empat macam peranan penting yang ada didalam masyarakat, yaitu:

1. Sebuah peranan harus dilaksanakan apabila terdapat struktur masyarakat yang akan dipertahankan keberadaannya.
2. Peranan hendaknya hanya diletakkan kepada pihak yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Sebaiknya berlatih terlebih dahulu untuk menumbuhkan kemampuan tersebut
3. Terkadang didalam masyarakat ditemui pemegang peran yang tidak mampu melaksanakan sebuah peran karena pelaksanaan peran tersebut terlalu banyak mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi.
4. Apabila semua yang memegang peran mampu melaksanakan perannya, belum tentu masyarakat dapat dengan leluasa memberikan peluang kepadanya untuk dapat melaksanakan peran dengan baik, karena mereka memberi batasan.[5]

B. Konsep Humas

Banyak ahli yang berpendapat bahwa penerjemahan istilah *public relations* menjadi hubungan masyarakat adalah kurang tepat. Pandangan tersebut didasarkan pada alasan, sebagai berikut. *Public* atau biasa ditulis publik atau khalayak, tidak sama dengan masyarakat atau *society*. Pengertian masyarakat (*society*) menurut JBAF Mayor Polak dalam Sosiologi, adalah wadah seluruh

[5]*Ibid;* hlm. 213

antar hubungan sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa menentukan suatu batas tertentu.[6]

Sedangkan pengertian *public* dapat ditinjau dari dua segi, menurut J. Handly Wright and Byron H. Christian dari segi geografis dan psikologis, sesecara geografis *public* adalah sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama di suatu tempat tertentu. Dari pengertian ini maka dikenal pembagian-pembagian publik (nasional, regional, lokal). Secara psikologis publik adalah orang-orang atau sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu kepentingan yang sama tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat di mana mereka berada.[7] Publik dapat berupa kelompok kecil ataupun kelompok besar. Individu-individu disini biasanya mempunyai solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh struktur yang nyata, tidak berada dalam suatu tempat, ruangan dan tidak mempunyai hubungan langsung.[8]

Demikian pula dengan penerjemahan *relations* ke dalam hubungan, juga kurang tepat. Sebab pengertian *relations* di sini menggunakan "s" yang menunjukkan arti jamak. Istilah *relations* bagi *public relations* merupakan prinsip, karena dengan *relations* mengandung arti adanya hubungan timbal balik (*two way communications*). Kemudia *relations* yang dimaksud *public relations* dalam praktek, selalu dalam pengertian yang positif, artinya bahwa *relations*

---

[6]Drs. Bambang Siswanto, MA., *Humas Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 3

[7]*Ibid;*

[8]Oemi Abdurrachman, *Dasar-dasar Public Relations*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 28

diadakan dalam rangka memperoleh *a sound and productive relations*, baik dengan *public* tertentu maupun dengan masyarakat pada umumnya.[9]

Humas dapat dibedakan ke dalam dua pengertian yakni sebagai teknik komunikasi dan sebagai metode komunikasi. Humas sebagai teknik komunikasi dimaksudkan bahwa humas dilakukan sendiri oleh pimpinan organisasi. Sedangkan humas sebagai metode komunikasi dimaksudkan bahwa dilakukan secara melembaga, dimana wahana humas ditekankan adalah berupa biro, bagian, seksi, urusan bidang dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa humas baik sebagai metode komunikasi adalah suatu lembaga untuk menggerakkan manusia-manusia yang terlibat, menuju sasaran dan tujuan lembaga.[10]

Seidal dalam Effendy memberikan definisi humas adalah proses kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh *good will* (kemauan baik) dan pengertian dari para pelanggannya, pegawainya, dan publik umumnya ke dalam menganalisa dan perbaikan terhadap diri sendiri, keluar dengan mengadakan pertanyan-pertanya.[11]

C. Peran Humas

Peran seorang humas adalah sebagai sarana untuk menjalin sebuah hubungan baik dan saling pengertiaan antara suatu lembaga atau organisasi terhadap publik atau khalayaknya. Namun tidak hanya itu saja, melainkan juga

---

[9]Bambang Siswanto; *Op.Cit;* hlm. 4

[10]Onong Uchjana Effendy, 1990. *Hubungan Masyarakat*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 5

[11]*Ibid;*

berbagai program-program dan upaya yang telah dikonsep oleh seorang humas melalui setiap cara berpikirnya berfungsi untuk mencapai cita-cita suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaan seorang humas merupakan ujung tombak perusahaan itu sendiri. Kelangsungan hidup suatu perusahaan terletak pada humas. Berbagai upaya seperti publikasi, sosialisasi, periklanan, menjalin hubungan baik dengan pers dan khalayak dilakukan untuk menanamkan *goodwill*, kepercayaan, dan citra yang baik di mata publik.

Peran hubungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, yang menurut F. Rachmadi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga atau organisasi.[12]

Peranan humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber-sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga tersebut.

---

[12]Dr. H. Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 56.

Sebagai *Public Relations Manager* (Pejabat Humas), seorang manajer dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan seluruh unsure sumber daya yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari kemampuaan sebagai fungsi manajemen teknis (*technical management*) dan kemampuan berperan sebagai manajer professional (*managerial skill*).[13]

Jadi, seorang manajer humas seharusnya memiliki kemampuan cukup komplit. Dia harus memiliki karakter yang merupakan perpaduan seni dengan professional yang baik dalam kemampuan manajerial, teknis, motivator, komunikator, perencanaan, pelaksanaan, dan hingga mengevaluasi program kerja dan sebagainya.

Sedangkan Onong Uchjana mengungkapkan peranan *public relations*, yaitu mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan tidak hanya sekedar berbentuk *relations* dalam arti sempit, karena *personal relations* mempunyai peranan yang cukup besar dalam melakukan kampanye *public relations*. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian, dan pemahanan tentang aktivitas perusahaan atau lembaga termasuk membentuk sikap baik (*favorable*), itikad baik (*good willI*), toleransi (*tolerance)*, saling pengertian (*mutual understanding*), saling mempercayai (*mutual confidence*),

[13]Rosady Ruslan, S.H, M.M., *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.13 Cet. 12

saling menghargai (*mutual appreciation*), yang pada akhirnya akan menciptakan citra yang baik (*good image*).[14]

Peranan humas dalam suatu organisasi dapat terbagi dalam empat kategori berikut:

1. *Expert preciber* (ahli atau penasehat manajemen)

   Praktisi humas dianggap sebagai seorang ahli yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan humas sebuah organisasi dan manajemen.

2. *Communications facilitator*

   Praktisi humas bertindak sebagai perantara, penghubung, penerjemah serta mediator, dan menjaga terwujudnya komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya.

3. *Problem solving process facilitator*

   Humas dilibatkan dalam memecahkan masalah organisasi meskipun peranannya masih dalam koridor komunikasi.

Berkaitan dengan itu, Dozier mengidentifikasi dua peran tingkat menengah, yaitu:

1. *Media relations role*. Tugas praktisi humas memastikan media selalu mendapat informasi dari organisasi apa saja yang dibutuhkan dan dikhawatirkan media.

---

[14]Rosady Ruslan, *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 12.

2. *Communication and laison role*. Humas bertugas sebagai perwakilan dari organisasi dalam kegiatan untuk menciptakan peluang berkomunikasi antara organisasi dan publiknya.[15]

1. Ruang Lingkup Humas

Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi/lembaga antara lain meliputi aktivitas sebagai berikut.[16]

a. Membina hubungan ke dalam (*public internal*)

Yang dimaksud dengan *public internal* adalah publik yang menjadi bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang humas harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan gambaran negatif didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh organisasi.

b. Membina hubungan keluar (*public eksternal*)

Yang dimaksud *public eksternal* adalah publik umum (masyarakat), mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap lembaga yang diwakilinya.

Sedangkan ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi enam bidang pekerjaaan, yaitu:

---

[15]Zainal Mukarom, *Op.Cit;* hlm. 153.
[16]Rosady Ruslan, *Op.Cit;* hlm 23.

a. Publisitas

Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas merupakan metode yang dapat dikontrol humas dalam hal penempatan pesan media massa karena sumber tidak membayar media untuk berita bersangkutan.[17]

b. Pemasaran

Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui proses pertukaran. Sementara itu menurut McCarthy, pemasaran menyangkut perencanaan secara efisien penggunaan sumber-sumber dan pendistribusian barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga tujuan kedua pihak produsen dan konsumen tercapai.[18]

c. *Public Affairs*

Public affairs dapat didefinisikan Cutlip sebagai *a specialized part of public relations that builds and maintains govermmental and local community relations in order to influence public policy*. Dalam pengertian, bahwa bidang khusus *public relations* yang membangun dan mempertahankan hubungan dengan pemerintah dan komunitas lokal untuk memengaruhi publik. Definisi ini menunjukkan adanya dua pihak yang menjadi fokus perhatian *public affairs*, yaitu

[17]Zainal, *Op.cit.*, hlm. 57

[18]*Ibid.*, hlm. 59

pemerintah dan masyarakat lokal. Pemerintah meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.[19]

d. Manajemen isu

Manajemen isu (*issues management*), menurut Morisan merupakan upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini publik agar tidak berkembang secara negatif sehingga merugikan perusahaan atau agar isu tidak berkembang menjadi konflik yang tidak diinginkan.[20]

e. Lobi

Menururt Cutlip, lobi adalah bidang khusus humas yang membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya, untuk tuuan memengaruhi peraturan dan perundang-undangan.[21]

f. Hubungan Investor

Hubungan investor adalah tanggung jawab manajemen strategis yang mengintegrasikan keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan hukum sekuritas yang paling efektif memungkinkan komunikasi dua arah antara perusahaan, masyarakat keuangan, dan konstituen lain, yang akhirnya memberikan kontribusi untuk perusahaan sekuritas mencapai penilaian adil.[22]

---

[19]*Ibid.,* hlm. 62

[20]*Ibid.,* hlm. 64

[21]*Ibid.,* hlm. 65

[22]*Ibid.,* hlm. 66

2. Ciri dan Fungsi Humas

Ciri adalah tanda yang khas untuk mengenal atau mengetahui. Berfungsi atau tidaknya humas dapat diketahui dari ada atau tidaknya kegiatan yang menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas antara lain:

a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik.
b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen sebuah organisasi.
c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal dan publik internal.
d. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi, baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik.[23]

Adapun fungsi dari humas menurut Cutlip & Centre adalah sebagai berikut :

a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi).
b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran.

---

[23]Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikologis,* (Cetakan ke-6 PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 24.

c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya.

d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan sasaran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.

e. Menciptakan komunikasi dua arah timbale balik, dan mengatur arus informasi, publikaasi serta pesaan dari badan/organisasi ke publiknya atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.[24]

D. Humas Pemerintah

1. Tugas Humas Pemerintah

Di dunia pemerintahan, humas bertugas menjalankan kegiatan kebijakan publik dan pelayanan publik. Salah satu kegiatan humas pemerintah dalam bidang kebijakan publik adalah memberikan berbaagai informasi tentang kebijakan pemerintahan yang mengikat rakyat atau masyarakat. Sedangkan untuk pelayanan publik adalah memberikan pelayanan terbaik, dengan birokrasi yang tidak berbelit-belit untuk memberikan kepuasan kepada rakyat atau masyarakat sehingga pemerintah memperoleh citra positif dari rakyat atau publik.

Tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat program pemerintahan yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra

[24]Rosady Ruslan, *Op.Cit;* hlm. 19.

positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja diciptakan oleh humas dalam dunia pemerintahan, dalam bentuk *events* (kegiatan-kegiatan), kampanye-kampanye, dan programs (program-program jangka panjang).[25]

Menurut Dimock dan Koening, pada umumnyaa tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:

a. Berupaya memberikaan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (*public services*), kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.
b. Mampu menanamkan keyakinan dan kepecayaan, serta mengajak masayarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.
c. Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta professional.[26]

---

[25]Elvinaro Ardianto, *Op.*Cit; hlm. 239

[26]Rosady Ruslan, S.H., M.M., *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Ed. Revisi, cet ke-6, 2011), hlm. 108.

Secara garis besar, humas instansi pemerintah memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi kedalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama.[27]

Lebih lanjut, F Rachmadi menyatakan bahwa pada dasarnya tugas Humas pemerintah adalah:

a. Memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah-langkah, dan tindakan-tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur dan obyektif.
b. Memberikan bantuan kepada media masa berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah serta tindakan pemerintah, termasuk fasilitas peliputi kepada media massa untuk acara-acara resmi yang penting. Pemerintah merupakan sumber informasi yang penting bagi media, karena itu sikap keterbukaan informasi sangat diperlukan.
c. Mempromosikan perkembangan ekonomi, dan kebudayaan yang telah dicapai oleh bangsa kepada khalayak di dalam maupun di luar negeri.

[27]*Ibid*, hlm, 109-110.

d. Memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah, selanjutnya menyampaikan tanggapan masyarakat dalam bentuk feedback kepada pimpinan instansi Pemerintahan yang bersangkutan sebagai input.[28]

Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

a. Secara taktis dalam jangka pendek, Humas instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya "menyamakan persepsi" dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.
b. Secara Strategis (jangka panjang) Humas instasi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (*decision making process*), dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang cemerlang serta kreatif untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilaan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.[29]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa humas di pemerintahan menjadi pemberi informasi kepada masyarakat sekaligus penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah adalah agen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat memberikan haknya untuk

---

[28]*Ibid.*, hlm. 78
[29]Rosady, *Op.Cit*; hlm. 110-111.

diwakilkan kepada orang-orang di pemerintahan agar dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Maka suatu kewajaran apabila pemerintah harus tetap terhubung dengan masyarakat dan setiap aspeknya menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Humas menjadi palang pintu bagi hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan publik atau masyarakat.

Secara garis besar humas mempunyai peran ganda: yaitu fungsi keluar berupa memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam humas wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansi atau tujuan bersama.

2. Fungsi Pokok Humas Pemerintah

Pada dasarnya fungsi pokok humas pemerintah antara lain:

a. Mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya.
b. Memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat.
c. Menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak.
d. Berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan

dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.[30]

Lebih lanjut Rosady Ruslan menyatakan bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu:

a. Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembga dengan publik internal dan eksternal.
b. Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.
c. Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa penting di lingkungan instansi atau lembaga.
d. Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang.[31]

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi dan perannya, Humas pemerintah harus mempunyai strategi terutama dalam memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta

---

[30]*Ibid;* hlm. 110
[31]*Ibid*; hlm. 345

mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada publiknya (masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana humas itu berada dan berfungsi.

E. Pengertian Sosialisasi

Sosialisasi adalah peyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan seseorang bertinak dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang menyebabkan ia efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.[32]

Sedangkan menurut Robbins, sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari komunikasi disamping sebagai produksi dan penegetahuan dalam hal ini komunikasi bertindak untuk mengendaalikan perilaku anggota masyarakat agar tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi, dalam hal ini sosialisasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada publiknya.[33]

Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu fungsi komunikasi yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat di mana ia tinggal. Jadi sosialisasi dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi kepada anggotanya.

Sosialisasi dalam arti yang luas merupakan suatu usaha masyarakat yang menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat

---

[32]Effendi, *Op.Cit*, hlm 27
[33]*Ibid;* hlm. 35.

melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerahterimakan kebudayaan daru satu generasi ke generasi berikutnya.

Proses sosialisasi bertujuan untuk:

1. Member keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidupnya di masyarakat
2. Mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan berbicara
3. Melatih pengendalian fungsi-fungsi organic melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat
4. Membiasakan individu dengan nilai-nilai dan kepercayaan pokok yang ada dalam masyarakat

Dari semua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat atau lembaga untuk memberikan pengajaran dan pendidikan melalui teknik komunikasi dan menyediakan sumber pengetahuan kepada publik agar bertindak sesuai dengan masyarakat dimama ia tinggal dan dapat berfungsi dalam masyarakat tersebu.

Menurut Narwoko dan Bagong, proses sosialisasi yang relevan bagi pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas:

1. Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi sosial.

2. Proses sosialisassi yang dikerjakan (secara sengaja) lewat proses pendidikan dan pengajaran.[34]

Berdasarkan pelaksanaan proses sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya proses ini bukanlah suatu aktivitas yang bersifat sepihak. Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua adalah aktivitas pihak yang disosialisasikan.

[34]Narwoko & Bagong, *Sosiologi Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 86.

BAB III

GAMBARAN UMUM BKKBN PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. Sejarah Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Keluarga Berencana di Sumatera Selatan telah dirintis sejak tahun 1960-an, beberapa orang tokoh perintis KB didaerah ini adalah Ny. Gopito, Ny. Irsan Rajamin dan Ny. Bambang Utoyo dengan dr. Kwik Kim Swie sebagai pelaksana medisnya.

Pada tahun 1963 dibentuk organisasi (PKBI) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia cabang Palembang. Pada bulan Februari 1968 presidenn Sooeharto menandatangani delegasi kependudukan sedunia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN Nomor 111/HK.010/C4/94 tanggal 22 Februari 1994, tentang uraian pekerjaan pejabat Esselon III, IV dan V dilingkungan BKKBN Wilayah.[1]

Pemerintah menyetujui program Nasional KB yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan bantuan dan bimbingan pemerintah hingga tanggal 17 Oktober 1968 dengan Surat Keputusan Nomor 26/KPT/Kesra/X/1966

[1]Sumber: BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

terbentuklah Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN) yang berstatus sebaagai lembaga semi pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, melalui keputusan Presiden No 8 tahun 1970 membentuk (BKKBN) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, maka pada tahun 1974 program KB secara resmi dikelola oleh BKKBN.[2]

Sebagai ketua BKKBN Provinsi Sumatera Selatan pertama kali adalah M Saman Halik, S.H. pada tahun 1979 gedung awal yang dipakai sejak BKKBN Provinsi Sumatera Selatan berdiri adalah gedung Rumah Sakit Paru-Paru di Jalan Merdeka Palembang. Kemudian organisasi BKKBN kembali disempurnakan dengan tujuan agar dapat mengatasi segala kekurangan dan melaksanakan program sebelumnya. Penyempurnaan organisasi BKKBN dilakukan berdasarkan KEPRES No. 38 Tahun 1978. Mengingat program KB Nasional merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pelayanan KB Nasional perlu ditingkatkan lagi dengan jalan lebih memanfaatkan dan memperluas kemampuan fasilitas dan sumber daya yang tersedia dan lebih menggiatkan dan mengefektifkan koordinasi serta keikutsertaan masyarakat. Untuk itu pada tahun 1983 BKKBN mengalami penyempurnaan organisasi melalui GBHN 1998

---

[2]*Ibid;*

program KB Nasional telah semakin mantap, melalui GBHN 1988 program KB Nasional mulai dicanangkan menjadi Gerakan KB.

Gambar 3.1 Gedung BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan selama periode 1974 s.d sekarang adalah sebagai berikut:[3]

1. 1974 s.d 1977 : M. Saman Halik, S.H
2. 1977 s.d 1979 : Letkol K. Achmad Mattjik
3. 1979 s.d 1981 : Letkol Dr. Hasan Zaini
4. 1981 s.d 1987 : Drs. Edyono Matheus
5. 1987 s.d 1991 : Drs. Mazwar Noerdin
6. 1991 s.d 1993 : Drs. Soetedjo Yuwono
7. 1993 s.d 1996 : Dr. H. Zainal Ichwan Ichlas
8. 1996 s.d 1998 : dr. H. Abu Hanifah, MPH

[3]*Ibid;*

9. 1998 s.d 2001 : Dr. Rusdi Satria Ridwan, MPH
10. 2001 s.d 2007 : Drs. H. Safaruddin Gumay, MM
11. 2008 s.d 2009 : Drs. H. Furqon Ia Farried, MA
12. 2009 s.d 2012 : dr. M. Tri Tjahjadi, MPH
13. 2012 s.d 2013 : Dra. Sri Rahayu, M.Si
14. 2013 s.d 2015 : Drs. Aan Jumhana Mulyana, M.Si
15. 2015 s.d 2016 : Drs. Ary Goedadi
16. 2016 s.d sekarang : Drs. Waspi

B. Lokasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

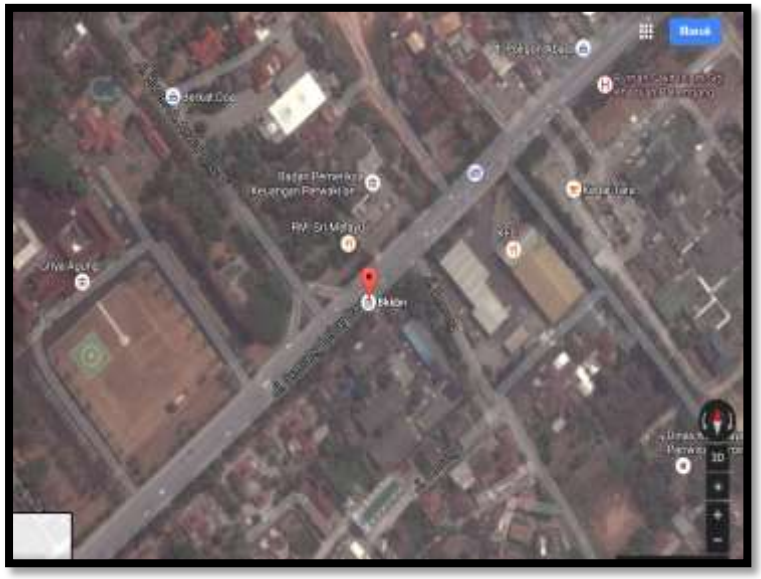

Gambar 3.2 Lokasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan terletak di Jalan Demanag Lebar Daun, Lorok Pakjo Ilir Barat I Nomor 4872 Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan 30151. Daerah Tigkat I Sumatera Selatan terletak antara 1^0 sampai 4^0 Lintang Selatan dan 102^0 sampai 108^0 Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 113.339,07 km^2 atau 11.333.907 ha. Batas Provinsi Sumatera Selatan di sebelah Utara dengan Daerah Tingkat 1 Jambi, di sebelah Selatan dengan Daerah Tingkat I Lampung, di sebelah Timur dengan Selat Karimata dan Laut Jawa, disebelah Barat dengan Tingkat I Bengkulu.[4]

C. Dasar Hukum Perwakilan Badan Kepedudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan

Dasar hukum tertulis merupakan kerangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah suatu Negara dalam menentukan mekanisme kerja. Dasar hukum yang melandasi kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan antara lain:[5]

1. Tap MPR No.IV/1999 tentang GBHN
2. Undang-undang No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
3. Undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

---

[4]*Ibid;*

[5]http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=18 di akses pada 27 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

4. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
5. Undang-undang No 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara
6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional
7. Undang-undang No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
8. Peraturan Pemerintah no. 21 tahun 1994 tentang penyelenggaraan Pembangunan keluarga Sejahtera
9. Peraturan pemerintah no 27 tahun tahun 1994tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
10. Keputusan Presiden No. 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
11. Keputusan Presiden No. 09 tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
12. Keputusan Presiden No. 110 tahun 2001
13. Peraturan Presiden No.7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2015

14. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.10/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKKBN Pusat
15. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan / Kepala BKKBN No.74/HK.010 /B5/2001 tahun 2001 tentang Tata Kerja BKKBN Provinsi dan kabupaten/Kota
16. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kedudukan Badan Kependudukan dan Keluaraga Berencana Nasional.

D. Visi dan Misi dan Tujuan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

1. Visi

Dalam melakukan fungsi dan tugasnya maka BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) membangun dan mewujudkan visi yaitu *"Menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas"*. Visi tersebut merupakan salah satu dari prioritas pembangunan nasional yaitu mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilisasi (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR)=1.

2. Misi

Dengan semangat Kebersamaan BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional) mengemban misi untuk mendukung visi yang ada. Misi ini dilakukan dengan cara:

a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan Kependudukan
b. Meneyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
c. Memfasilitasi pembangunan keluarga
d. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
e. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

3. Tujuan

Untuk melaksanakan misi dan mencapai visi BKKBN, maka tujuan yang harus dicapai oleh BKKBN yaitu;

a. Mewujudkan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan kependudukan.
b. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.[6]

[6] Sumber: Arsip Staff Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

E. Strategi dan Nilai Dasar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional

1. Strategi

   Strategi Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yaitu;

   a. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program Keluarga Berencana
   b. Menata kembali pengelolaan program Keluarga Berencana
   c. Memperkuat SDM (Sumber Daya Manusia) operasional program Keluarga Berencana
   d. Mrningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan Keluarga Berencana
   e. Meningkatkan pembiayaan program Keluarga Berencana

2. Nilai dasar

   Nilai dasar Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional yaitu Cerdas, Tangguh, Kerja sama, Integritas, Ikhlas.[7]

---

[7] *Ibid;*

F. Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan[8]

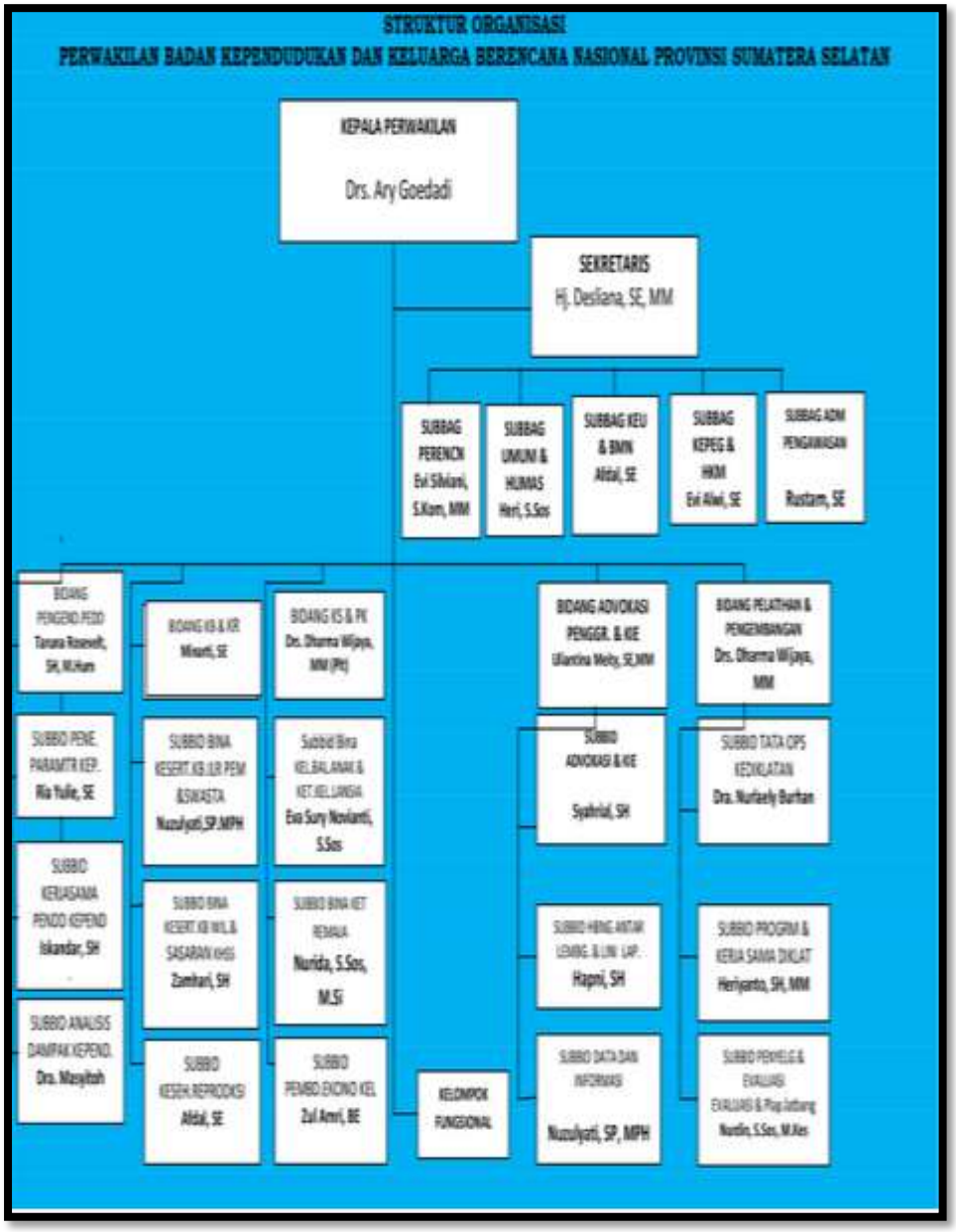

Gambar 3.3 Struktur Organisasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

[8]http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=24 di akses pada 27 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

G. Tugas, Fungsi dan Kewenangan

1. Tugas

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[9]

2. Fungsi

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi, terdiri dari:

a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKKBN
c. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah, swasta, LSOM dan masyarakat di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan

[9] http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=21 di akses pada 27 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hokum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga[10]

3. Kewenangan

Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan mempunyai kewenangan yaitu:

a. Penyusunan rencana nasional secara makro dibidangnya
b. Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro
c. Perumusan kebijakan pengendlian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
d. Penentapan system informasi di bidangnya
e. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
    1) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
    2) Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga[11]

[10] http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=22 di akses pada 27 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

[11] http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=23 di akses pada 27 Oktober 2016 pukul 11:00 WIB

H. Daftar Jumlah Pegawai BKKBN Provinsi Sumatera Selatan[12]

No	Nama	Jabatan	Golongan
1	Sri Rahayu, SH.M.Si	Auditor	IV/d
2	Dra. Dewi Farida. M.Kes	Widyaiswara	IV/d
3	Herly Hevran, SE	Auditor	IV/d
4	Drs. Waspi	Kepala	IV/c
5	Amran, SE	Auditor	IV/c
6	Maddawi, SE	Auditor	IV/c
7	Kholifaturrahman, SH	Widyaiswara	IV/b
8	Drs. Dharma Wijaya, MM	Kabid	IV/b
9	Desliana, SE, MM	Sekretaris	IV/b
10	Minarti, SE	Kabid	IV/b
11	Drs. Dani Saputra, M. Kes	Peneliti	IV/b
12	Atika, S.Sos	Arsiparis	IV/b
13	Uliantina Meity, SE. MM	Kabid	IV/b
14	Nuzul Yati, SP, MPH	Kasibbid	IV/a
15	Maharani, SH, M. Ed	Staff	IV/a
16	Dra. Masyitoh Mansyur, M. Si	Kasubbid	IV/a
17	Ria Yulie, SE, M.Si	Kasubbid	IV/a
18	Drs. Cikwan, M.Si	Peneliti	IV/a
19	Nurdin, S. S.Sos, M.Kes	Kasubbid	IV/a
20	Dra. Nurleyli Burhan	Kasubbid	III/d
21	Dra. Siti Rohana	Staff	III/d
22	Zainab, SE	Kasubbag	III/d
23	Siti Zahara, SE	Staff	III/d
24	Drs. Suherman	Staff	III/d
25	Zul Amri, BE	Kasubbid	III/d
26	Zamhari, SH	Kasubbid	III/d
27	Rustam, SE	Kasubbag	III/d
28	Eva Sury Novianti, SH	Kasubbid	III/d
29	Zulfahri Siregar, SH	Staff	III/d
30	Heri, S.Sos	Kasubbag	III/d
31	Iskandar, SH	Kasubbid	III/d

[12]Sumber: BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

32	Drs. D.A Suhaimi	Auditor	III/d
33	Elvi Alwi, SE, M.Si	Kasubbag	III/d
34	Salman Muuaqin, SH	Staff	III/d
35	Nurida, S.Sos, M.Si	Kasubbid	III/d
36	Heriyanto, SH, M.Si	Kasubbid	III/d
37	Hapni, SH	Kasubbid	III/d
38	A. Pikir, SH	Staff	III/d
39	M. Mislani, SH	Staff	III/d
40	Rasyadu, DJ, SH	Staff	III/d
41	Yaspan, SH	Staff	III/d
42	Evi Slviani, S.Kom, MM	Kasubbag	III/d
43	Darwin, S.Ip	Staff	III/d
44	Adang Rukmana, SH	Staff	III/d
45	Syahrial, SH	Kasubbid	III/d
46	Afdal, S.Sos	Kasubbid	III/d
47	Sulastri, BA	Staff	III/c
48	Ratna Dewi, BA	Staff	III/c
49	Renilita	Staff	III/c
50	Rosidah, S. IP	Staff	III/c
51	Mars Yuldanella, S. IP	Staff	III/c
52	Yuhanis, S. IP	Staff	III/c
53	Sukaran, SE	Staff	III/c
54	dr. Fahrina	Staff	III/c
55	dr. Akhmad Maskyur	Staff	III/c
56	Dian Lestari, SH	Staff	III/c
57	Risma Sihite	Staff	III/b
58	Wahyuniah	Staff	III/b
59	Istilawati. AR	Staff	III/b
60	Linda Priyanti	Staff	III/b
61	Subirin	Staff	III/b
62	Siti Aisyah	Staff	III/b
63	Sampe Aram	Staff	III/b
64	Antony Salem	Staff	III/b
65	Indrawati	Staff	III/b
66	Lilis Sutisna	Staff	III/b

67	Rohmiyati	Staff	III/b
68	Anwar	Staff	III/b
69	Aidil Usman	Staff	III/b
70	Sinta Mayasari, S.Psi	Staff	III/b
71	Sherly Marlisa, SE, M.Si	Staff	III/b
72	Poppy Siska Issabella, S. Si, Apt	Staff	III/b
73	Dewi Harmarisa, SH	Staff	III/b
74	Andi Budi Santosa, SE	Staff	III/b
75	Susanto, S.Pd	Staff	III/b
76	Eka Yulinda Prsetyowati, S.Psi	Staff	III/b
77	Dwi Septianis, S.K.M	Staff	III/b
78	Dwi Noviyana, SE	Staff	III/b
79	Reza Utami, SE	Staff	III/b
80	Ria Febriyanti, S.Kom	Prakom	III/b
81	Bahrul, SH	Staff	III/a
82	Viya Yanti Mala, S.Sos	Peneliti	III/a
83	Laus Issaberna, S.Sos	Widyaiswara	III/a
84	Coline Asita, S.IP	Widyaiswara	III/a
85	Pratama Putri, S.IP	Widyaiswara	III/a
86	M. Andi Agus Widjaya, SE	Satpam	III/a
87	Mardani, SH	Staff	III/a
88	Andi Kamarzaman, S.Psi	Staff	III/a
89	Endro Priyo Nugroho, SH	Staff	III/a
90	Nur Syarifah, A.Md	Staff	II/d
91	Karim	Staff	II/c
92	Waris	Staff	II/c
93	Wijaya Kusuma Julianto	Staff	II/b
94	Ariyanto	Satpam	II/b
95	Adi Chandralika	Staff	II/b
96	Emik	Pesuruh	II/a
97	M. Endang Maryadi	Staff	II/a
98	Herman Sari	Satpam	II/a

Tabel 3.1 Data Jumlah Pegawai BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

I. Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Didalam Instansi pemerintahan seorang praktisi humas sangat berperan penting bagi Instansi pemerintahan tersebut bahwasannya humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksikan setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberi masukan-masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepentingan khalayaknya.[13]

Gambar 3.4 Depan Ruang Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

[13]Anggoro M, *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia, (*Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), hlm. 2.

Adapun tugas dan fungsi praktisi humas adalah sebagai berikut:[14]

1. Tugas Humas dan Protokol

a. Mengembangkan jejaring dengan media massa dan organisasi kehumasan
b. Mengadakan liputan program KKB
c. Mengelola opini publik
d. Membuat kliping berita
e. Membuat analisis berita
f. Menyelenggarakan konferensi pers
g. Membuat dan menyebrkan siaran pers
h. Membuat hak jawab
i. Membuat bahan publikasi pencitraan BKKBN
j. Menyelenggarakan forum komunikasi Bakohumas tingkat Provinsi
k. Menugaskan bawahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan

2. Fungsi Humas dan protokol

a. Pelaksana pengembangan jejaring dengan media massa dan organisasi kehumasan
b. Pelaksana publikasi pencitraan BKKBN
c. Penyelenggara komunikasi Bakohumas
d. Pembuat kliping dan analisa berita

[14]Sumber: Arsip Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

e. Pelaksana liputan kegiatan program KB

f. Pemimpin

g. Pengelola opini publik

h. Pengelola hak jawab

i. Penyelenggara konferensi pers

j. Pembuatan dan penyebaran siaran pers

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Untuk mensosialisasikan kebijakan dan program kegiatan pemerintah, serta dalam menerima saran dan kritikan yang membangun untuk disampaikan kepada pemerintah, humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan harus mampu memberikan informasi sebanyak mungkin bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Palembang pada khususnya demi tersosialisasikannya program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga. Oleh karena itu, dibutuhkan peran humas agar tercipta komunikasi yang baik kepada masyarakat dalam mensosialisasikan kebijakan dan program kegiatan pemerintah.

Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun informal yang didasarkan pada ketentuan dan harapan peran yang menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.

Mengenai peran humas BKKBN dalam rangka mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, diketahui peran yang digunakan humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam

Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berbasis Keluarga, yaitu berdasarkan teori peran humas menurut Rosady Ruslan, yang terdiri dari:

1. Sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik.
2. Membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik.
3. Peranan sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan.
4. Membentuk *corporate image*, artinya peranan humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya.[1]

Peran yang digunakan humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Berbasis Keluarga terdapat hubungan yang erat atas seluruh cara yang dipilih. Hal terpenting adalah bahwa cara yang dipilih untuk mencapai suatu hasil tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peran humas sebagai *communicator* dengan sebagaimana mestinya.

1. Sebagai *Communicator*

Setiap organisasi pasti mengerti apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan dalam masyarakat. Kepada masyarakat itulah organisasi senantiasa menjalin komunikasi, baik secara internal maupun eksternal. Oleh karena itu,

[1]Dr. H. Zainal Mukarom, M.Si & Muhibudin Wijaya Laksana, S.Sos., M.Si., *Manajemen Public Relations*, (Bandung: Pustaka Setya, 2015), hlm. 56.

BKKBN Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya menyelenggarakan komunikasi dengan staff atau pegawainya saja untuk dapat memahami kebutuhan masyarakat.

Sebagaimana yang ditegaskan Nuzul Yati, Subbid Data dan Informasi:

> Seperti yang kita tahu bahwa semakin hari jumlah penduduk di Indonesia semakin meningkat. Sesuai dengan tugas kami yang salah satunya adalah dengan menahan jumlah pertumbuhan penduduk yaitu dengan melakukan KB bagi yang sudah menikah agar kita memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang sangat penting sebagai landasan kemajuan bangsa dan negara. Tanpa adanya pengendalian jumlah penuduk dan pengelolaan sumber daya manusia yang berkualitas maka akan berdampak pada pemanasan global, kerusakan lingkungan dan juga kemiskinan.[2]

Ditambahkan pula oleh Syahrial, Kasubbid Advokasi dan KIE mengatakan bahwa:

> Sebenernya program KB ini dari dulu bukannya tidak maju, tapi begitulah program ini dari dulu. Untuk menciptakan keluarga yang baik, keluarga yang harmonis meskipun sedikit tapi berkualitas tidak perlu banyak. Kalau pun banyak tapi tidak berkualitas ya kan buat apa?. Maksudnya anak itu asalkan sedikit tapi berkualitas. Dua anak lebih baik bukan dua anak cukup tapi dua anak lebih baik. Maksudnya dengan dua anak lebih baik itu. Dua anak ini mungkin memang sedikit ketimbang dengan yang lain-lain tapi kita sesuaikan perekonomian saat ini, dua anak itu sudah cukup rasanya karena untuk biaya pendidikan dan biaya hidup. Sekarang ini tidak cukup cuma makan. Jadi menurut kami dua anak lebih baik oleh karena dia harus berkualitas. Percuma anak banyak tapi tidak terurus dan tidak terbiaya sekolahnya. Takutnya apabila tidak bersekolah, maka lingkungan yang ditemuinnya pun tidak baik dan akhirnya jadi preman. Itu yang kita takutkan dari situ.[3]

---

[2]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

[3]Syahrial, SH, Kepala Sub Bidang Advoksi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 September 2016.

Gambar 4.1 Plang Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling

Gambar diatas adalah informasi tentang pelayanan dan konseling yang bisa dilakukan masyarakat untuk datang langsung ke BKKBN sesuai dengan hari dan waktu yang telah ditentukan. Menurut peneliti, Pemberitahuannya sudah cukup baik dilihat dari usaha BKKBN dalam menyampaikan informasinya seperti itu sehingga dapat disimpulkan bahwa BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sangat terbuka kepada masyarakat, sehingga masyarakatpun bisa turut andil dalam memberikan saran dan kebutuhan apa saja yang sebenarnya mereka butuhkan sehingga progam-program yang sedang dan akan dijalankan pun bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. Program KB harus benar-benar terealisasi ke masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya ber-KB. Tidak hanya

itu, diharapkan juga agar dapat merencanakan kehidupan berkeluarga sehingga dapat berkurangya angka pernikahan pada usia dini. Program KB tidak hanya mengendalikan kelahiran anak tapi juga dapat mengendalikan perekonomian.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka pihak dari perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan selalu mengadakan atau menyebarluaskan informasi yang diharapkan dapat terjadi secara timbal balik, baik itu melalui komentar pembaca pada situs resmi, facebook, twitter, ataupun koran serta BKKBN Provinsi Sumatera Selatan juga menerima secara langsung masyarakat yang datang ke tempat. Masukan-masukan baik kritik mapun saran yang didapat dari masyarakat akan dikomunikasikan lebih lanjut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Heri, S.Sos:

> Dalam posisi ini kami berperan sebagai penghubung dengan memfasilitasi masyarakat yang mau melakukan konseling pelayanan keluarga sejahtera. Jadi, kami disini bersifat dua arah dimana humas berada ditengah-tengah antara masyarakat dan pemerintah. Humas merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dan pemerintahan.[4]

Dipertegas pula oleh Syahrial, Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE:

> Kami sangat menerima masukan dari masyarakat baik itu kritik maupun saran, dengan begitu kami akan mendapatkkan timbal balik dari program yang sedang kami jalankan sehingga masukan dan kritik dari masyarakat bisa membangun kami agar bisa lebih baik lagi. Masukan baik kritik maupun saran yang membangun kami diskusikan kemudian kami bahas dalam rapat, harapan kami agar masyarakat terus mendukung program-program yang kami buat serta dapat terlibat

[4] Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

karena program ini terutama KB merupakan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.[5]

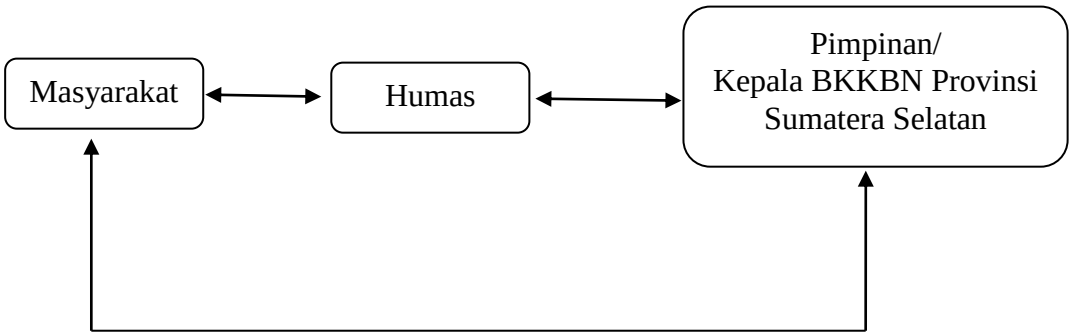

Sumber: Diolah Dari Data Lapangan

Gambar 4.2 Arus Komunikasi

Arus komunikasi diatas adalah proses penyaluran komunikasi di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Prosesnya sudah cukup baik dilihat dari alurnya yang terstruktur seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa humas dituntut untuk mampu menjelaskan pesan yang disampaikan dari masyarakat berupa keluhan dan saran yang diterima akan didiskusikan atau dirapatkan kepada pimpinan sehingga pimpinan bisa mengetahui hal apa saja yang diinginkan masyarakat, begitun sebaliknya. Pimpinan bisa menyampaikan bentuk kegiatannya kepada masyarakat melalui perantara humas atau secara langsung.

Setiap kali ada program kerja baru maka akan dirapatkan terlebih dahulu. Apabila sudah ada hasil akhir maka seorang pimpinan akan memberikan kewenangan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarkat luas hal ini

[5]Syahrial, SH, Kepala Sub Bidang Advoksi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 September 2016.

diharapkan agar program yang telah dibuat bisa terealisasikan dengan baik. Hal ini juga dipertegas oleh Heri, S.Sos yang mengatakan:

> Di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan memiliki banyak bidang yang sudah memiliki tugasnya masing-masing, semua informasi mengenai kegiatan kami bisa dilihat pada website yang sudah kami siapkan yaitu sumsel.bkkbn.go.id. semuanya kami *share* disana. di website tersebut langsung keluar informasi apa saja yang dibutuhkan, yang mau ditanya juga bisa bahkan kalau mau bisa langsung datang kesini. Bukan hanya itu saja, kami juga bersosialisasi melalui iklan di TV, radio, koran, spanduk dan juga event-event tertentu. Disini kami juga melayani masyarakt yang mau ber-KB secara langsung.[6]

Gambar 4.3 Peringatan Hari Keluarga Tingkat Sumatera Selatan di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil maka harus disebarluaskan kepada masyarakat baik itu melalui media

[6]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa tau berita terbaru tentang program yang ada di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Peran sebagai *communitator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik yang dilakukan humas dengan menjembatani komunikasi antar pihak manajemen perusahaan dan publiknya melalui kegiatannya baik itu masyarakat yang mendatangi langsung BKKBN Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak BKKBN yang datang ke masyarakat. Melalui media ini, perannya sebagai mediator antara perusahaan dan publiknya dapat terlaksana meskipun masih dalam bentuk yang sederhana, namun untuk sekarang ini dirasa cukup efektif untuk memfasilitasi kebutuhan dalam mencari informasi yang berkaitan dengan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan BKKBN sendiri tentunya.

2. Membina *Relationship*

Seorang humas harus memiliki kemampuan yang tinggi sehingga dapat berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik baik itu internal maupun eksternal dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah humas dalam sebuah organisasi dan manajmen. Apabila terjadi permasalahan, humas biasanya mendefinisikan permasalahan yang terjadi dalam organisasinya maupun dalam program yang tengah dijalaninya sehingga humas harus bertanggung jawab terhadap semua bentuk pelaksanaan dari program yang telah dibuatnya.

Pendapat ini juga ditegaskan oleh Heri, S.Sos, Kasubbag Umum dan Humas:

> Dalam merumuskan suatu masalah maka kita harus benar-benar tahu apa sebab masalah ini muncul. Kita harus benar-benar cari sampai ke akar-akarnya agar nantinya dalam membuat suatu keputusan tidak melakukan kesalahan dan permasalahan yang ada pun bisa teratasi dan diusahakan agar tidak terulang kembali. Masalah yang datang harus di diskusikan dengan atasan karena kita tidak bisa menggambil keputusan sendiri. Kita harus mengikui aturan yang berlaku sesuai dengan struktur yang ada.[7]

Ditambahkan pula oleh Nuzul Yati, Subbid Data dan Informasi:

> Salah satu tugas humas adalah memberikan masukan kepada pimpinan dan juga dalam pelaksanaannya. Untuk memberikan masukan terhadap suatu isu yang berkembang di masyarakat ataupun dalam menciptakan hal-hal yang baru, maka harus dilengkapi dengan data dan berbagai informasi sehingga setiap permasalahan yang datang harus di identifikasi telebih dahulu.[8]

Dapat disimpulkan bahwa seorang humas harus tau secara mendalam tentang permasalahan yang ada agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Karena di khawatirkan apabila suatu permasalahan tidak di selesaikan dan diambil tindakan secara benar maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan baru. Sehingga seorang humas harus jeli dalam menyikapi suatu permasalahan.

Dalam suatu organisasi pasti ada masalah yang datang baik itu dari pihak internal maupun eksternal. Dalam memecahkan masalah dibutuhkan

---

[7]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

[8]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

strategi dan pemikiran yang matang. Pemecahan masalah yang dilakukaan oleh Humas ini adalah agar tidak adanya perselisihan dalam pihak internal maupun eksternal serta diharapkan adanya kesesuaian yang menyenangkan yang berarti masalah terpecahkan. Sebagaimana dijelaskan Nuzul Yati, SP, MPH:

> Dalam memecahkan suatu masalah yang datang hal pertama yaitu kita komunikasikan dari atasan bagian kita ke pimpinan. Misalnya tidak selesai kami lanjutkan ke sekretaris. seandainya sekretaris tidak bisa, masalah ini kami naikan langsung menghadap ke kepala dinas bagaimana sebaiknya permasalahan ini. Cuma untuk saat ini, belum ada permasalahan itu yang belum bisa di atasi. Pada dasarnya semua masalah kalau kita mau menengahinya bisa terselesaikan.[9]

Ditambahkan pula oleh Heri, S.Sos Kasubbag umum dan humas:

> Seorang humas harus serba tahu terutama tentang instansi yang di naunginya. Humas harus selalu *update* melalui berbagai media baik itu cetak maupun elektronik. Humas harus melaporkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan instansinya kepada atasan, sehingga apabila terdapat isu yang tidak mengenakkan, humas dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menanganinya.[10]

---

[9]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

[10]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

Gambar 4.4 Rapat Pembukaan Review Program KKBPK Provinsi Sumatera Selatan

Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa setiap ada suatu permasalahan maka harus diselesaikan dengan mengikuti aturan yang ada dan juga menggunakan strategi. Hal ini tentunya harus ada komunikasi yang baik agar mendapatkan solusi yang baik. Sebelum memcahkan suatu masalah, maka pertama-tama harus mendefinisikan masalah tersebut.

Untuk membangun *image* yang baik tentang suatu instansi maka di butuhkan pemikiran-pemikiran yang baik. Hal itu tentu saja tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena harus mengikuti sesuai tahapannya. Dalam hal ini, para staff maupun kepala bidang harus tahu tahapan-tahapannya.

Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan biasanya melakukan rapat terlebih dahulu untuk akhirnya membuat suatu putusan tentang program yang akan dilaksankan. Setelah melakukan rapat, hasil akhir yang telah diputuskan diberikan kepada bagian-bagian yang sudah ditugaskan sesuai dengan posisi dan peran dalam proses keputusan. Dalam melaksanakan suatu program maka akan melibatkan berbagai kelompok yang memang tidak bisa dipisahkan karena mereka saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di pertegas Heri, S.Sos, Kasubbag Umum dan Humas:

> Selaku Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan kami memiliki peran yaitu sebagai pemberi masukan terhadap atasan atau pimpinan yang bertugas dalam mengeluarkan kebijakan, seperti program KKBPK maka sebagai humas khusunya dituntut untuk memberikan masukan terhadap apa saja kebijakan yang akan dikeluarkan karena apabila kebijakan tersebut berdampak negative maka akan menghasilkan citra negative pada instansi.[11]

Hal ini juga ditegaskan lagi oleh Syahrial, Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE:

> Pada umumnya dalam memberikan masukan kepada pimpinan melalui rapat, dan biasanya kalau untuk pimpinan-pimpinan eselon tiga dan eselon 4 itu tidak bisa memberikan saran pendapat secara langsung kalau tidak melalui rapat dan itu juga harus disetuju sekretaris karena sekretaris yang berwenang. Contohnya andai bidang lain ingin memberikan saran kepada bidang lainnya, tidak boleh dilakukan secara langsung karena harus mengikuti aturan sesuai dengan struktur organisasi. Dalam hal ini nantinya atasan yang akan menjelaskan di dalam forum.[12]

---

[11]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

[12]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

Dari penjelasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa dalam peran ini sebagai membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling menguntungkan dengan pihak publik, humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri dan mencari solusi dalam masalah mengenai mensosialisasikan suatu program. Humas dan pihak internal BKKBN mempunyai hak untuk menentukan bagaimana cara yang dilakukan untuk meraih perhatian masyarakat dalam mensosialisasikan program KKBPK selama cara-cara tersebut sesuai dengan visi dan misi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu, mereka juga berperan dalam membuat program-program yang kreatif dan inovatif sesuai dengan program kerja dari BKKBN. Jadi, peran sebagai membina *relationship* ini dijalankan dengan memberikan nasihat dan masukan kepada pimpinan sesuai keahlian Humas untuk mensosialisasikan setiap program BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

3. Peranan Sebagai Pendukung Dalam Organisasi atau Perusahaan

Untuk mensosialisasikan suatu program, maka humas harus memiliki sarana pendukung dalam menyebarluaskan informasi mengenai perusahaan yang dinaunginya. Humas harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi, maka dari itu humas di zaman sekarang ini harus mengikuti perkembangan dimana sekarang ini zamannya teknologi dan informasi sehingga seorang humas pun harus menguasai hal tersebut.

Hal ini juga disampaikan oleh Nuzul Yati:

> Peran yang digunakan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembagunan Keluarga melalui revolusi mental berbasisi keluara yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan informasi dalam mensosialisasikan tentang program-program yang berkaitan dengan KB, selalu melakukan hubungan yang baik dengan wartawan karena seperti yang kita tahu bahwa sekarang ini menyebarluaskan informasi melalui media sangat cepat sekali sehingga seorang humas harus selalu tahu informasi-informasi terbaru terutama tentang instansinya. Kamu juga menyebarluaskan informasi secara langsung kepada masyarakat degan mengadakan seminar-seminar maupun event-event yang melibatkan masyarakat secara langsung.[13]

Gambar 4.5 Duta Mahasiswa Genre saat Mengikuti Sosialisasi Program KKBPK

Untuk mensosialisasikan program KKBPK, Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan memiliki beberapa lagkah yang biasa di lakukan. Langkah-

[13]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

langkah yang dibuat oleh Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ini berdasarkan penjelasan Syahrial:

> Langkah-langkah yang bisa kami lakukan dalam mesosialisasikan program ini agar bisa terwujud dan terus meningkat yaitu kami sebarkan informasi melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik, kami buat iklan-iklan yang menarik serta tak lupa kami berikan kolom komentar dan saran agar bisa komunikasi timbal balik sehingga kami tau apa-apa yang masih kurang. apalagi sekarang kita merambah ke generasi remaja namanya Genre, nah Genre ini kami sosialisasikan dari mulai SMA sampai Mahasiswa yang nantinya akan kita pilih sebagai Duta Genre dan mereka kami beri ruangan agar mereka bisa menetap, mereka mengelola ilmu-ilmu KB untuk remaja kesehatan alat reproduksi, untuk usia masa kesuburaan usia perkawinan, kehamilam pada usia berapakah yang siap, baik buruknya pergaulan itu yang bagaimana. Disitu sudah kita masukan bagaimana sosialisasinya. Jadi kalau memang dipakai oleh remaja-remaja kita sekarang ini, mudah-mudahan itu baik dan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang. Jadi bergaul itu yang sehat dan yang baik itu ialah yang tidak mengarah ke narkoba dan seks bebas. Dan semua bekal itu sudah kami berikan semua ke duta Genre.[14]

Menurut peneliti, Humas BKKBN Provisi Sumatera Selatan dalam hal ini sadar akan perlunya langkah-langkah untuk mengajak atau membujuk masyarakat agar mau bekerjasama dengan BKKBN Provisi Sumatera Selatan agar program tersebut dapat terealisasikan dengan baik. Itu terlihat dari beberapa program yang dilakukan oleh BKKBN Provisi Sumatera Selatan seperti mengadakan beberapa kegiatan yang melibatkan masyarakat. Ini dilakukan oleh BKKBN Provisi Sumatera Selatan semata-mata untuk membuat masyarakat merasa bahwa BKKBN Provinsi Sumatera Selatan memang peduli dengan

[14]Syahrial, SH, Kepala Sub Bidang Advoksi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 September 2016.

keadaan mereka sehingga mereka bisa merasa nyaman dan percaya terhadap BKKBN Provisi Sumatera Selatan terutama dalam mewujudkan program KB.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam usaha mempromosikan dan Menyebarluaskan Informasi tentang Program-Program yang Mendukung program KKBPK. Dalam memaksimalkan Teknologi Informasi, Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menggunakan beberapa media untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat tentang program-progran yang mendukung program KKBPK. Media-media yang digunakan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi kepada masyarakat adalah:

a. ***Website*** **<u>sumsel.bkkbn.go.id</u>**

Gambar 4.6 Halaman Depan Website BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Website adalah kumpulan-kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi teks, data, dan gambar yang disediakan melalui jaluur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan intenet. BKKBN Provisi Sumatera Selatan juga mempunyai *website* resmi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, yang mana *website* tersebut berisikan semua informasi mengenai BKKBN Provisi Sumatera Selatan yang boleh di lihat ke masyarakat luas, sebagai sumber informasi yang akurat yang di berikan oleh BKKBN Provisi Sumatera Selatan. Humas BKKBN Provinsi Sumtera Selatan melakukannya dengan mengefektifkan media *online website* sumsel.bkkbn.go.id.[15]

Melalui hasil wawancara, diketahui bahwa dalam sosialisasi programnya, Humas BKKBN Provisi Sumatera Selatan juga menggunakan media *online* yaitu sumsel.bkkbn.go.id yang dikelola secara langsung oleh Humas BKKBN Provisi Sumatera Selatan. Dengan adanya *website* resmi BKKBN Provisi Sumatera Selatan, masyarakat semakin dipermudah untuk mengetahui semua informasi yang terkait mengenai BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Mulai dari informasi rencana program ataupun kebijakan BKKBN Provisi Sumatera Selatan.

b. Melalui Pemanfaatan Media Sosial

Selain melalui situs resmi BKKBN Provinsi Sumatera, dalam memberikan informasi dan sosialisasi kebijakan dan program yang dilaksanakan

[15] Sumber: bkkbn.sumsel.go.id di akses tanggal 5 Oktober 2016

oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, ada pula akun resmi twitter BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, yaitu @bkkbnsumsel

Gambar 4.7 Halaman Depan Akun Twitter BKKBN Provinsi Sumsel

Berdasarkan penjelasan Nuzul Yati:

> Sekarang ini zamannya sosial media. Inilah salah satu tantangan seorang humas karena dia dituntut untuk selalu bisa mengikuti zaman. Dengan begitu kita tidak akan ketinggalan informasi dan masyarakat pun bisa tau segala macam kegiatan atau program yang dijalankan. Terlebih lagi penyebarluasan informasi melalui media ini sangat cepat sampai ke masyarakatnya apalagi sekarang kan zamannya sosial media, jadi Humas juga ikut 'bersosial media' dalam mensosialisasikan kegiatan yang ada di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.[16]

Dari penjelasan diatas maka dapati disimpulkan bahwa semakin hari teknologi di seluruh belahan dunia mengalami banyak perubahan, sehingga media sosial bukan hal asing lagi untuk di perbincangkan. Media sosial

[16]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

menyediakan kepraktisan dan kecepatan bagi seluruh masyarakat. Kini, media sosial memiliki manfaat yang sangat tinggi dalam menyebarluaskan informasi.

c. Melalui Media Cetak dan Televisi

Media lainnya yang sudah dari dulu digunakan Pemerintah Kota Palembang yang adalah Iklan Layanan Masyarakat (ILM) melalui media cetak, baik berupa koran, majalah, spanduk, *banner*, pamflet dan juga televisi. Koran adalah sejenis surat kabar yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa penting yang selalu ditunggu banyak orang untuk mengetahui apa yang terjadi dan hal lainnya yang dibutuhkan orang-orang. Dalam hal surat kabar, BKKBN Provinsi Sumatera menjalin hubungan baik dengan media surat kabar Sriwijaya Post, Sumatera Ekspress, dan lain-lain. Sedangkan media televisi, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan juga menjalin kerjasama dengan Pal TV, Sriwijaya TV dan TVRI.

Sebagaimana dijelaskan Heri, S.Sos:

> Yang hendak di capai oleh BKKBN ini pastinya agar masyarakat bisa lebih tahu tentang BKKBN baik itu program-program yang lagi dijalani atau yang masih dicanangkan, maka dari itu kami sebisa mungkin memanfaatkan berbagai media untuk menyebarluaskan informasinya dengan harapan bentuk sosialisasi kami terutama tentang KB banyak masyarakat yang mengetahuinya dan masyarakat pun bisa ikut berperan aktif.[17]

[17] Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

Gambar 4.8 BKKBN Menggandeng TVRI dalam Mensosialisasikan Program

Selain surat kabar, media cetak lainnya yang menyampaikan informasi-informasi mengenai program BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yaitu spanduk yang di pasang di pinggir jalan, *banner* yang diletakkan di loby kantor BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, serta pamflet serta brosur yang dibagikan kepada masyarakat yang berisikan info-info dari BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

Dapat kita lihat baliho dan *banner* yang menunjukkan bahwa BKKBN Provinsi Sumatera Selatan juga menggunakan media cetak tersebut sebagai alat untuk informasi kepada masyarakat Kota Palembang dan karyawannya. spanduk ataupun *banner* diletakkan di kantor ataupun tempat strategis lainnya agar setiap masyarakat yang datang ke kantor BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dapat melihat *banner* tersebut.

Selain komunikasi menggunakan media, komunikasi yang tidak menggunakan media juga digunakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan sebagai alat kerja praktisi humas yang efektif, yaitu menggunakan pesan-pesan lisan. Penyampaian pesan humas dilakukan secara langsung, melalui sambutan Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan misalnya dalam acara kuliah umum, di sela-sela pertemuan dinas dan pertemuan dengan masyarakat. Selain untuk menumbuhkan rasa silahturahmi dan membuat hubungan yang baik, di sini juga para pejabat tersebut melakukan interaksi. Contohnya pada saat peresmian kampung KB, para pejabat BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ini akan bertemu dengan masyarakat secara langsung, kemudian berinteraksi dan menyampaikan atau mensosialisasikan program pemerintah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Syahrial:

> Dalam mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah, kita bisa juga menyampaikannya secara langsung. Misalnya di sela-sela kata sambutan Bapak Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam suatu acara atau pertemuan yang dilaksanakan, Bapak Kepala menyelipkan kalimat meminta dukungan masyarakat dalam mewujudkan program Keluarga Berencana yang sudah ada dan sedang berjalan.[18]

[18] Syahrial, SH, Kepala Sub Bidang Advoksi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara tanggal 26 September 2016.

Gambar 4.9 Sumatera Selatan Sosialisasi KKBPK Secara Langsung

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi lisan yang di lakukan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan bisa bermanfaat juga dalam proses sosial dalam berwarga negara dan mempererat tali persaudaraan antar pribadi maupun kelompok.

Kegiatan yang tak kalah penting yang dilakukan oleh humas adalah selalu menjaga hubungan baik dengan wartawan. Karena seperti yang kita tahu bahwa dari tulisan-tulisan yang dimuat dalam berbagai media merupakan jembatan penghubung antara BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dengan khalayak sasaran, yaitu masyarakat Kota Palembang.

Hubungan yang baik dengan wartawan akan sangat membatu humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. *Feed back* dari kerjasama ini akan menimbulkan saling ketergantungan sehingga saling menguntungkan bagia kedua belah pihak. Pihak media membantu menyebarluaskan informasi melalui berita yang dimuat di medianya, dan Humas membantu pihak media melalui berita yang dikirimnya.

Berdasarkan penjelasan oleh Nuzul Yati:

> Media merupakan perantara yang sangat baik bagi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Sebab melalui media, informasi bisa sangat cepat sampai ke masyarakat dan bisa menyentuh berbagai macam lapisan. Di satu sisi wartawan dan Humas juga saling menguntungkan. Wartawan butuh berita buat di *share* ke publiknya dan humas butuh wartawan untuk menyebarluaskan informasi-informasi kegiatan yang dijalankan dan akan dijalankan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, maka dari itu hubungan yang sangat baik ini harus tetap di jaga.[19]

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa Humas harus dapat menjaga hubungan yang baik dengan wartawan agar tujuan Humas dapat tercapai melalui bantuan media atau wartawan. Dengan terbatasnya waktu yang dimiliki humas, humas mempunyai strategi khusus dalam membina hubungan baik dengan wartawan. Strategi mengenai berhubungan dengan media dan wartawan merupakan salah satu perencanaan kerja humas yang tertera di dalam rencana bisnis yang selalu dibuat humas setiap tahunnya.

---

[19] Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

Bagi humas dan anggotanya, peran sebagai pendukung dalam fungsi organisasi ini diartikan sebagai bentuk implementasi dari program-program yang mereka rencanakan. Peran ini merupakan bentuk pembuktian bahwa humas tidak hanya bekerja di belakang meja saja tapi juga ikut terjun langsung ke lapangan untuk melakukan kegiatan yang memang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat pada foto program-program kegiatan yang dijalankan oleh humas.

4. Membentuk *corporate image*

Ada beberapa langkah-langkah yang bisa dilakukan humas dalam berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya, seperti yang dikatakan Heri, S.Sos bahwa:

> Dalam menciptakan citra organisasi maka selalu dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang baru sesuai dengan zaman sekarang. Kita harus jeli apa-apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa sebab program belum berjalan dengan efektif. Kemudian kita susun apa-apa rencana program yang sudah di analisis selanjutnya kita adakan rapat untuk merumuskan bagaimana sebaiknya program ini berjalan lalu kita adakan evaluasi baik itu per bulan maupun pertahun. Itu semua akan kelihatan kalau kita pake grafik, BKKBN pusat menunggu laporan grafik dari kita. Misalkan dari kabupaten ini tahun ini atau bulan ini jumlah aseptornya itu tetap atau bertambah atau berkurang. Kalau memang dia berkurang apa masalahnya, kalau dia memang tetap apa masalahnya kok tidak nambah, berapa jumlah penduduk disitu, berapa anak penduduk situ terus kalau hasilnya lebih dari yang sebelumnya maka itu lebih baik. Berarti ada peningkatan dari kemarin. Selain itu dalam setiap program, kita harus tau sasaran yang hendak di tuju, jadi kita harus mengidentifikasi khalayak apakah itu anak muda,

> keluarga atau lansia agar program itu bisa tepat sasaran dan sesuai apa yang dikehendaki oleh suatu organisasi.[20]

Peneliti melihat bahwa langkah-langkah dalam merencanakan program dalam memajukan organisasi yang digunakan oleh BKKBN Provinsi Sumatera Selatan ini sudah terstruktur dengan baik. Setelah semua itu dijalankan maka akan menemukan bagaimana humas dalam menjalankan perannya di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Ini merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksud untuk membantu pimpinan dalam memajukan organisasi.

Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan dan menjabarkan apa yang harus menjadi penentu dari penentuan pengambilan keputusan untuk peran yang akan digunakan karena keputusan ini pasti akan mempengruhi instansi.

Berikut ini akan disajikan jawaban narasumber dari hasil wawancara mendalam yang penulis lakukan terhadap Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan yaitu Heri, S.Sos:

> Dalam setiap masalah yang datang baik itu dari dalam ataupun dari luar tidak bisa kita biarkan apalagi dibiarkan berlarut-larut. Contohnya saja apabila terjadi di dalam instansi, kalau kita membiarkan masalah yang ada maka lambat laun itu akan mempengaruhi kinerja, apabila dari luar takutnya masalah itu akan semakin besar. Apabila terjadi berita yang tidak benar maka akan

[20]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

cepat kami klarifikasi dengan sebenar-benarnya sesuai fakta yang ada.[21]

PALEMBANG POS

2 Kelurahan Bakal Ditimbun

Pelajar Tewas Dirampok

Ubah Imej dengan Emas

Tewas Dibakar Massa

Diduga Hendak Bobol Rumah Warga

Oknum PNS BKKBN Cabuli Keponakan

Tegang dan Histeris

Firasat Tak Enak, Sempat Telepon Istri

Gambar 4.10 Berita Negatif yang Berkaitan tentang BKKBN

Dari penjelasan diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa setiap permasalahan yang datang, tidak boleh di biarkan berlarut-larut karena takutnya akan menganggu kenyamanan dan membuat citra yang buruk. Sehingga apabila ada permasalahan maka harus di selesaikan dengan cepat, tepat dan juga akurat dengan memberikan fakta-fakta yang sebenar-benarnya.

[21]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

Humas harus benar-benar tahu tentang keadaan yang terjadi saat ini terutama keadaan disekitarnya karena humas merupakan etalase dari suatu instansi. Humas harus cakap dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga humas tidak boleh lengah sedikit pun. Hal ini disampaikan pula oleh Heri, S.Sos:

> Itulah seorang humas, dia harus bisa dalam berbagai hal terutama dalam menghadapi suatu persoalan yang berkaitan dengan instansinya. Karena bagusnya instansi ini bukan hanya Humas yang mendapat pujian tapi seluruh pihak yang ada di BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Namun dalam beberapa hal humas harus berperan lebih aktif. Semisal ada berita yang berkaitan dengan instansi, kita harus lebih tahu dulu apa yang menjadi penyebabnya kemudian kita analisis dan kita buat apa-apa saja yang bisa dilakukan agar persoalan itu terselesaikan. Barulah kita sampaikan kepada atasan agar bisa didiskusikan bersama.[22]

Ditambahkan pula oleh Syahrial, Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE:

> Dalam menghadapi suatu krisis yang terjadi, maka akan dibentuk suatu tim ahli dari humas dengan melibatkan berbagai departemen dan keahlian dalam suatu tim khusus untuk membantu orgnisasi yang tengah mengalami krisis. Artinya, bagian humas tidak berdiri sendiri. Karena semua harus berkoorinasi dengan departemen yang berkaitan sehingga dapat mengambil kebijakan.[23]

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan yang tidak bisa di selesaikan. Seorang humas harus cakap dalam berbagai hal karena humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi dan meyakinkan masyarakat baik internal maupun ekternal buat mengerti dan mampu menerima sebuah situasi.

---

[22]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

[23]Syahrial, Kepala Sub Bidang Advokasi dan KIE BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016

Gambar 4.11 Ajang Pemilihan Duta Mahasiswa Genre

Peran ini dijalankan Humas dan pihak BKKBN melalui beberapa kegiatan seperti dalam menjalankan visi dan misi BKKBN dari kalangan remaja dengan mengadakan ajang pemilihan duta Genre, mengadakan penyuluhan sampai ke pelosok daerah. Selain itu, humas dan pihak internal BKKBN juga berperan dalam memberikan solusi bagi BKKBN melalui program-program yang inovatif yang dirasa bisa membantu permasalahan yang dihadapi perusahaan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui seberapa berhasilnya humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat berikut menurut penuturan dari kelima masyarakat, berdasarkan Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi kesehatan

yang beralamat di Sekojo Kecamatan Kalidoni:

> Program KB itu sebenarnya sangat bagus demi terciptanya petumbuhan penduduk yang seibang dan berkualitas. Dari segi sosialisasinya kalau kami sebagai mahasiswa di kesehatan pastinya di beri tahu sehingga kami mengerti manfaat dari KB. Namun apabila dilihat dari sudut pandang yang lain, misalnya menyebarluaskan informasi melalui media massa, itu sangatlah bagus karena sekarang ini sudah zamannya teknologi dan informasi sehingga kami tidak perlu susah payah mengenai program KB dan semacamnya. Apalagi BKKBN ini memiliki ajang berbakat bagi remaja, dan mereka menggunakan media sosial untuk memberitahukan semua informasi, itu bisa ngena ke para remaja. Selain mellui media massa saya juga pernah melihat BKKBN sosialisasi secara langsung, hal itu sangat bagus karena bisa melakukan interaksi dengan Tanya jawab secara langsung dan meminimalisisr kesalahan pendapat.[24]

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu Maryati yang merupakan Ibu Rumah Tangga yang bertempatan di wilayah Sekojo Kecamatan Kalidoni. Ia mengataka bahwa:

> Partisipasi masyarakat dalam menjaalankan program keluarga berencana, masyarakat disini saya lihat sudah menjalankan program keluarga berencana karena kesadaran diri, ada pula karena ia berpendidikan yang tinggi sehingga mengerti dengan program KB ini dan juga karena merasa malu melihat tetangganya yang ikut. Walaupun ada beberapa golongan yang melarang atau mengharamkan program keluarga berencana, masyarakat tetap mengikuti program keluarga berencana tersebut.[25]

Pendapat lainnya disampaikan oleh Ibu Tri Wahyuni yaitu masyarakat di wilayah Sekojo, mengatakan bahwa:

> Saya sangat menyetujui adanya program KB, yang saya harapkan adalah program KB agar bisa disosialisasikan lebih baik lagi agar

[24] Nanda Anggieta, Mahasiswa, wawancara tanggal 30 Januari 2017.
[25] Maryati, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara Tanggal 30 Januari 2017.

> kami bisa lebih mengeri apa dan bagaimana program KB tersebut. Saya pribadi hanya mengerti sedikit sekali tentang program KB ini. Mungkin karena saya pribadi yang sedikit acuh. Tapi saya adalah warga yang mengikuti program KB dan mendukung program Pemerintah dengan dua anak lebih baik.[26]

Pendapat selanjutnya dari Dona sebagai warga yang sudah memiliki 3 anak:

> Menurut saya program KB ini sangat bagus karena bisa menjaga jarak kehamilan agar bisa merawat anak dan saya sendiri khusunya. Dan juga untuk mengurangi jumlah penduduk. Saya sendiri memili tiga anak dan itu tentunya tidak mengikuti program KB Pemerintah dimana dua anak cukup. Hal ini dikarenakan saya sudah memiliki dua anak laki-laki dan berharap memiliki anak perempuan tetapi Allah tetap mempercayakan anak laki-laki untuk yang ke tiga ini. Namun sekarang saya rasa sudah cukup dan mau fokus merencanakan masa depan buat anak-anak. Sekarang zamannya sudah beda, dimana banyak anak pastinya banyak pula pengeluaran walaupun sebenarnya rezeki anak itu sudah ada masing-masing, namun tetap saja kita harus bersiap dari sekarang dan saya sangat mendukung dan setuju terhadap program KB ini dan saya juga rajin untuk ber-KB.[27]

Pendapat terakhir disampaikan oleh Rossi sebagai mahasiswa magang di salah satu rumah bidan di kota Palembang yang bertempat di wilayah Sekojo Kecamatan Kalidoni, ia mengatakan bahwa:

> Yang saya lihat disini, sosialisasi yang dilakukan pemerintah secara langsung dengan turun ke beberapa masyarakat (bidan dan kesehatan lainnya), kemudia dari kami menghimbau masyarakat yang lebih luas untuk mau melaksanakan program keluarga berencana. Upaya pemerintah dalam menjalankan program keluarga berencana sudah berjalan lancar dan diterima oleh masyarakat seperti yang kami temukan dilapangan. Pemerintah sangatlah bagus kepada masyarakat karena pemerintah selalu

---

[26]Tri Wahyuni, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara Tanggal 30 Januari 2017.
[27]Dona, *Ibu Rumah Tangga*, Wawancara Tanggal 30 Januari 2017.

> memperhatikan keadaan penduduk dan melakukan sosialisasi lewat puskesmas-puskesmas secara langsung berhadapan dengan masyarakat.[28]

Berdasarkan wawancara di atas jelaslah bahwa dalam mensosialisasikan programnya humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya semaksimal mungkin dengan melakukan berbagai macam cara baik itu terjun langsun maupun melalui media massa unutk menginformasikan kepada masyarakat tentang program kependudukan keluarga berencana pembangunan keluarga. Hasil pendapat narasumber di atas, menunjukkan bahwa pemerintah khusunya disini BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, pesan-pesan yang disampaikan sudah banyak yang tahu mengenai program ini sehingga dapat mengena ke masyarakat dan juga menerapkannya.

B. Hambatan dan Tantangan dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga

Hambatan utama yang dihadapi Humas dalam menyebarluaskan informasi dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga adalah masalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam gerakan KB

[28]Rossi, *Mahasiswa Magang*, Wawancara Tanggal 30 Januari 2017.

Yang ditegaskan Heri, S.Sos :

> Apabila ditanya tentang faktor penghambat yang pasti dari masyarakat itu sendiri yang sebenarnya mereka tau bahwa di Inonesia ini ada gerakan KB dengan slogan dua anak cukup tapi mereka tidak mau mendukungnya. Disinilah tugas humas untuk mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi kemudian media sosial itu menjadi tantangan kita agar kita bisa memanfaatkan media sosial itu untuk menyampaikan informasi cepat, tepat dan akurat. Selain itu yang menjadi factor penghambat Cuma masalah teknis seperti macet dijalan, pecah ban, dan lain-lain. Sejauh ini kalau kendala besar belum ada.[29]

Gambar 4.12 Mobil Operasional BKKBN Provinsi Sumatera Selatan

Program KKBPK ini merupakan kegiatan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga, BKKBN Provinsi Sumatera Selatan tentunya telah

[29]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

menyiapkan dan menetapkan Program-program kegiatan yang akan dilaksanakan yang bertujuan untuk kesejahteraan setiap keluarga. Sebagaimana ditegaskan oleh Nuzul Yati:

> Program-program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat ini yang berkaitan dengan KB sebenarnya sudah sangat lama. Apalagi tentang revolusi mental yang digemakan kembali oleh ibu Puan Maharani. Begitu kita mendapatkan rujukan mereka ya kita langsung lanjutkan. Kita sosialisasikan e seluruh bidang dan terbuka untuk umum sesuai dengan revolusi mental ini. Apa yang baik yang bisa kita laksanakan pasti akan kami laksanakan, mengenai berbasis keluarga, kita semua pasti setuju bahwa keluarga merupakan lingkungan kecil yang selalu ada di dekat kita dan pastinya kita setuju bukan bahwa lingkungan merupakan pengaruh nomor satu dalam setiap tingkah laku kita. Balik lagi ke revolusi mental, yang namanya revolusi mental itu kalau tidak dari individu pribadi yang merubahnya rasanya sulit. Contohnya orang tua kita, saudara kita sudah memberikan contoh yang benar melalui tingkah laku, bahasa, pengarahan dan nasihat. Untuk selanjutnya pada saat si anak di luar rumah kita tidak pernah tau apa yang di perbuat karena kita tidak bisa senantiasa menontrol anak selama 24 jam. Selanjunya apabila apa yang telah ditanamkan pada si anak masuk ke dalam hati dan pikirannya mungkin dia tidak akan melakukan kenakalan-kenakalan di luar sana. Jadi balik ke individu masing-masing amu atau tidak berevolusi jadi yang ebih baik. Sekalipun program revolusi mental ini dicanangkan sehari tiga kali tapi kalau individu masing-masing itu masih menolak artinya tidak ada yang berubah. Ada satu hal lagi menjai factor penghambat yaitu masalah dana operassional, apabila tidak dibarengi dengan kegiatan efisiensi sekarang ini maka mobil pelayanan KB itu bisa keluar setiap hari. Jadi kita itu menjemput bola oleh karena kita target. Pusat jugo menyiapkan target buat kito sekian-sekian ynag harus tercapai. Jangan tahun ini dengan tahun depan samo bae tapi harus lebih dari itu[30]

[30]Nuzul Yati, SP, MPH. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Wawancara tanggal 26 September 2016

Lebih lanjut Heri S.Sos menjelaskan:

> Dalam melaksanakan program-program demi terwujudnya keluarga sejahtera BKKBN harus secara cakap terjun kelapangan dengan melakukan sosialisasi yang lebih ke masyarakat agar program ini dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan masyarakat pun bisa secara sadar mengikuti program ini.[31]

Berdasarkan pendapat di atas, diketahui bahwa selain masalah kurangnya partisipasi masyarakat ada pula masalah teknis yang haus dihadapi oleh Humas BKKB Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengatasi adanya hambatan ini, Heri, S.Sos menegaskan:

> Kita berupaya untuk mencari solusi dari hambatan yg terjadi. Untuk masalah dana itu relatif ya. Kalau dananya besar, juga akan menjadi semacam beban bagi kita. Kemudian kalau terlalu kecil juga kita susah untuk bergerak jadi mungkin kita butuh dana yang proporsional sesuai dengan program kerja kita jadi untuk mengatasinya kita selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan kita apa yang kita perlukan, mana yang perlu di rekrut, ya direkrut, mana yang butuh pelatihan ya dilatih, mana yang butuh ditambah ya ditambah, seperti itu.[32]

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi hambatan yang dihadapi, Humas BKKB Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk mencari solusi dari hambatan yg terjadi. Kemudian untuk masalah dana, bersifat relatif, Jika dananya besar juga akan menjadi semacam beban bagi Humas Pemerintah kota Palembang tapi kalau terlalu kecil juga susah untuk bergerak bagi Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

---

[31]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

[32]Heri, S.Sos. Kepala Sub Bagian Umum dan Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan, Wawancara 26 September 2016.

Jadi, humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan dana yang proporsional sesuai dengan program kerja Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengatasinya, Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pimpinan tentang apa-apa yang diperlukan. Bila dirasa perlu penambahan staff maka dilakukan perekrutan staff baru, dan bila dirasa perlu pelatihan maka dilakukan pelatihan terhadap staff kehumasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan yang dipandu teori Rosady Ruslan,mengenai peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam dalam mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga berbasis keluarga antara lain yaitu: 1) sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik, yang pada intinya Humas harus bisa menangkap keinginan dan kebutuhan masyarakat kemudian menyampaikannya kepada pimpinan dan kemudian disampaikan kembali ke masyarakat 2) membina *relationship* yaitu berupaya membina hubungan positif dan saling mengungtungkan dengan pihak publik, dalam hal ini humas harus merumuskan masalah yang sedang dihadapi organisasi serta diharapkan bisa memberikan pemikiran pada atasan 3) peranan sebagai pendukung dalam organisasi atau perusahaan, yang pada intinya humas harus bisa menghadapi perkembangan zaman sekarang ini dengan menguasai teknologi dan informasi dengan menyebarluaskan informasi mengenai program-programnya baik melalui media massa dan juga melalui pesan secara langsung 4) membentuk *corporate image*, yang intinya humas harus memiliki rencana yang baik untuk memajukan organisasinya

serta mampu mengambil keputusan yang cepat, tepat dan akurat dan bisa menghadapi dan mengatasi persoalan yang terjadi.

2. Hambatan dan tantangan dalam mensosialisaikan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga) yaitu:
   a. Dari segi partisipasi masyarakat dan juga masalah teknis serta masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih harus ditingkatkan lagi dalam berbagai hal.
   b. Dari segi masalah dana bersifat relatif. Jika dananya besar juga akan menjadi semacam beban bagi BKKBN Provinsi Sumatera Selatan tapi kalau terlalu kecil juga susah untuk bergerak bagi humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan.

B. Saran

Setelah dilaksanakannya penelitian tentang peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga, peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu memberi kontribusi dalam mengembangkan wawasan pengetahuan serta pemikiran dalam bidang komunikasi pada mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan KPI.

2. Dapat membantu memberikan solusi sebagai bahan rujukan atau referensi bagi mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian skripsi.
3. Hendaknya humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan menjaga pencapaian-pencapaian prestasi yang telah diraih yaitu *image* yang cukup baik dikalangan masyarkat.
4. Memperbaiki sistem peraturan yang telah di buat, tegas kepada anggota agar dapat lebih menerapkan etika yang sudah berjalan dengan baik di pemerintahan agar citra BKKBN Provinsi Sumatera Selatan lebih baik lagi di kalangan masyarakat.
5. Meningkatkan lagi dalam pelayanan dan peran humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan agar menjadi lebih baik.
6. Sedangkan masukan untuk saya sendiri sebagai peneliti ialah dengan adanya penelitian skripsi ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrachman, Oemi. 1990. *Dasar-Dasar Public Relations*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Anggoro. 2002. *Teori dan Profesi Kehumasan Serta Aplikasinya di Indonesia.* Jakarta: PT Bumi Aksara

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Cahyaningrum, Yuli. 2013. *Peran Humas (Hubungan Masyarakat) di Pemerintah Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah. Diakses dari http://thesis.umy.ac.id/datapublik/t25611.pdf. pada tanggal 19 Januari 2016.

Diakses dari http://news.liputan6.com/read/2174726/harapan-baru-bangkitnya-program-pembangunan-keluarga. pada tanggal 12 Feb 2015.

Diakses dari http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Tantangan-Program-KKB-Makin-Berat_3184. pada tanggal 23 Juni 2016.

Diakses dari http://sumsel.bkkbn.go.id/ViewBerita.aspx?BeritaID=732. pada tanggal 16 September 2015,

Effendy, Onong Uchjana. 1990. *Hubungan Masyarakat.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Keraf, Gorys. 1989. *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. Jakarta: Nusa Indah.

Mazidah, Aris. 2010. *Peran Public Relations dalam Implementasi Community Development PT. Telkom Tbk Kandatel Yogyakarta.*Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/5286/1/BAB%201,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf. Pada tanggal 4 Januari 2016.

Morissan. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mukarom, Zainal & Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. *Manajemen Public Relations*, Bandung: Pustaka Setia.

Narwoko & Bagong. 2007. *Sosiologi Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.

Oktavianingsih, Tika. 2012. *Peran Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada Peran Humas DPR RI dalam Menjaga Reputasi Kinerja Anggota DPR RI)*. Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Indonesia. Diakses dari http://li.ui.ac.id/file?file=digital/20300085-S-Tika%Oktavianingsih.pdf. Pada tanggal 6 Januari 2016.

Ruslan, Rosady. 2000. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ruslan, Rosady. 2006. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Ed. 1. Cet. 3 PT RajaGrafindo Persada.

Ruslan, Rosady. 2008. *Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ruslan, Rosady. 2011. *Etika Kehumasan Konsepsi dan Aplikasi*, (Jakarta: Ed. Revisi, cet ke-6 PT RajaGrafindo Persada.

Ruslan, Rosady. 2014. *Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi*. Jakarta: Cet.12 Rajawali Pers.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

Siswanto, Bambang. 1992. *Humas Hubungan Masyarakat Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara

Soemirt, Soleh & Elvinaro Ardianto. 2003. *Dasar-Dasar Public Relations.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Public*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Helwa Septi Tricahyani

NIM : 12510029

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi :Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Revolusi Mental Berbasis Keluarga

Pembimbing I : Drs.Syahir Badruddin, M.Si

No	Tanggal	Keterangan pembimbing	Paraf
1.	29/11 16	Perbaiki Bab IV, teori kesuksesan	
2.	30/11 16	Perbaiki Bab V, form ru	
3.	07/12 16	- Perbaiki - ulasi - Dee	
4.	13/01 16	- Dee manajemen	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Helwa Septi Tricahyani

NIM : 12510029

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi :Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Revolusi Mental Berbasis Keluarga

Pembimbing II : Henny Yusalia, M.Hum

No	Tanggal	Keterangan pembimbing	Paraf
	29/8 '16	perbaiki Bab I sesuai saran	
	3/10 '16	Acc bab I.	
	14/10 '16	Acc bab II.	
	24/10 '16	Acc bab III.	
	10/11 '16	perbaiki bab IV. (Tambahkan hasil wawancara)	
	14/11 '16	Analisa bab IV.	
	28/11 '16	Acc Bab IV.	

LEMBAR KONSULTASI

Nama : Helwa Septi Tricahyani

NIM : 12510029

Fakultas/Jurusan : Dakwah dan Komunikasi / Komunikasi Penyiaran Islam

Judul Skripsi :Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Melalui Revolusi Mental Berbasis Keluarga

Pembimbing II : Henny Yusalia, M.Hum

No	Tanggal	Keterangan pembimbing	Paraf
	27/12 '16	ACC BAB V.	

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 159 TAHUN 2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI STRATA SATU (S.1)
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Menimbang :
1. Bahwa untuk mengakhiri Program sarjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa.
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Dosen yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.390 Tahun 1993 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 404 tahun 1993 tentang statuta UIN Raden Fatah Palembang;
5. Keputusan Menteri Agama RI No.27 Tahun 1995 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri;
6. Keputusan Menteri Agama RI No.232 Tahun 1991 yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 298 Tahun 1993.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Menunjuk sdr. :
1. Drs. Syahir. M.Si — NIP : 19521223 198303 1 003
2. Henny Yusalia. M.Hum — NIP : 19820116 200901 2 009

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama	:	**HELWA SEPTI TRICAHYANI**
NIM/Jurusan	:	12 51 0029 / Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Semester/Tahun	:	GENAP / 2015 – 2016
Judul Skripsi	:	Peran Humas Dalam Mensosialisasikan Program KKBPK Melalui Revolusi Mental Berbasis Keluarga di BKKBN Propinsi Sumatera Selatan.

Kedua : Berdasarkan masa studi tanggal 28 bulan Juli Tahun **2017.**

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 28 – 07 – 2016

A.n. REKTOR UIN RADEN FATAH PALEMBANG
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI,

KEMENTERIAN AGAMA RI — UIN RADEN FATAH PALEMBANG — FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

KUSNADI

TEBUSAN :
1. Rektor UIN Raden Fatah Palembang ;
2. Ketua Jurusan KPI / BPI / Jurnalistik / Sistem Informasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

DAFTAR PERBAIKAN SKRIPSI

Nama : Helwa Septi Tricahyani

NIM : 12510029

Jurusan : Komunikasi Penyiaran Islam

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi :**Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga**

No	DAFTAR PERBAIKAN
1	Abstrak
2	EYD/Redaksi Kalimat
3	BAB IV
4	BAB V

Palembang, 6 Maret 2017

Penguji I

Drs. H. M. Musrin HM, M.Hum
NIP. 19531226 198603 1 001

Penguji II

Rosita Baiti, M.Pd.I
NIP. 19730226 200003 2 002

PERMOHONAN PENJILIDAN SKRIPSI

Hal : **Permohonan Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth

Dekan Faklutas Dakwah dan Komunikasi

UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan Pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwah skripsi:

Nama	: Helwa Septi Tricahyani
NIM	: 12510029
Jurusan/Fakultas	: Komunikasi Penyiaran Islam / Dakwah dan Komunikasi
Judul Skripsi	:**Peran Humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga**

Sudah disetujui untuk dijilid. Demikianlah perihal ini kami buat dengan sebenarnya, Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 6 Maret 2017

Penguji I	**Penguji II**
Drs. H. M. Musrin HM, M.Hum	**Rosita Baiti, M.Pd.I**
NIP. 19531226 198603 1 001	**NIP. 19730226 200003 2 002**

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan pejabat dan pegawai BKKBN Provinsi Sumsel

1. Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Sumsel dalam mensosialisaikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga ini?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga ini?
3. Apa saja yang dilakukan humas dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga?
4. Informasi apa yang disampaikan kepada sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga ini?
5. Bagaimana pesan dikemas agar dapat diterima dengan baik pleh khalayak yang menjadi sasaran?
6. Saluran komunikasi apa yang dipilih untuk menyebarluaskan atau menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga ini?
7. Apakah evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan program?
8. Tujuan dan manfaat apa yang diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan tersebut?

9. Apa yang diharapkan pihak BKKBN melalui program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga ini?
10. Bagaimana humas menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kepentingan kebutuhan publik?
11. Bagaimana humas BKKBN Provinsi Sumsel membantu memberikan masukan dan pemikiran kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel dalam mensosialisaikan program KKBPK Berbasis Keluarga?
12. Apakah humas BKKBN Provinsi Sumsel menyampaikan atau merespon keinginan dan kebutuhan masyarakat kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel begitu pula sebaliknya?
13. Bagaimana cara humas BKKBN Provinsi Sumsel mengatasi persoalan atau krisis dalam mensosialisaikan setiap programnya?
14. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kinerja humas BKKBN Provinsi Sumsel dalam mensosialisaikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga?

Wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimana pendapat anda tentang program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga yang dilakukan oleh BKKBN? Apakah program ini sudah cukup tersosialisasi sampai ke masyarakat?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data pribadi

Nama	: Helwa Septi Tricahyani
Alamat	: Jl. Pasundan Lrg.Nyiur I No. 65 RT. 036 RW 008 Kel/Kec. Kalidoni-Palembang.
NIM	: 12510029
Program Studi	: Komunikasi Penyiaran Islam (KPI)
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	: Madiun, 10 September 1994
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Warga Negara	: Indonesia
No Telp	: 081367114080

Nama Orang Tua	
Ayah	: Purnomo
Ibu	: Purwanti Asri Ningtyas
Alamat Orang Tua	: Jl. Pasundan Lrg. Nyiur I No. 65 RT.036 RW 008 Kel/Kec. Kalidoni-Palembang

Riwayat Pendidikan

Periode			Sekolah	Jurusan
2000	-	2006	SD Negeri 59 Palembang	-
2006	-	2009	SMP Negeri 50 Palembang	-
2009	-	2012	MA Negeri 2 Palembang	IPA

Hormat Saya,

Helwa Septi Tricahyani